

**RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TENTANG KADAR KEWAJIBAN SUAMI DALAM  
MENAFKAHI KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19**

ACC Untuk Dimunaqasyahkan  
12 Januari, 2022  
Pembimbing



Khoirul Amru Harahap  
19760405200501101



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**MUHAMMAD IKHSAN SETIAJI**  
NIM. 1717302023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Ikhsan Setiaji

NIM : 1717302023

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2022  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Ikhsan Setiaji  
NIM. 171730203



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto Jawa Tengah, 53126  
Telp : 0281-635624 628250 Fax : 0281-636553

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR  
KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Yang disusun oleh **Muhammad Ikhsan Setiaji (NIM 1717302023)** Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

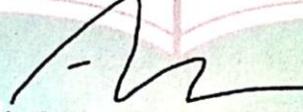
**Ketua Sidang/Penguji I**

  
**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 197506202001121003

**Sekretaris Sidang/Penguji II**

  
**H. Moh. Toha Umar, M.A.**  
NIDN. 2004067002

**Pembimbing/Penguji III**

  
**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405200501101

Purwokerto, 10 Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 1970087052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Muhammad Ikhsan Setiaji  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Ikhsan Setiaji  
NIM : 1717302023  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TENTANG KADAR KEWAJIBAN SUAMI DALAM  
MENAFKAHI KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405200501101

## MOTTO

... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya.”

(QS al-Kahf ayat 110)



## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat Allah Yang Maha Mencintai lagi Maha Pemurah dan sembari memanjatkan shalawat serta salam kepada manusia yang paling baik budi pekertinya, Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Idris dan Ibu Sri Sudaryati
2. Semua guru yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis



**RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR  
KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI MASA  
PANDEMI COVID-19**

**ABSTRAK**

**Muhammad Ikhsan Setiaji  
NIM. 1717302023**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Akibat dari pandemi Covid-19 adalah para kepala keluarga kesulitan untuk memberikan nafkah. Di sisi lain, menafkahi keluarga hukumnya adalah wajib. Penulis menemukan ada istri yang meminta suaminya untuk tetap memberikan nafkah seperti saat normal. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang bagaimana bersikap berumah tangga. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu pemikir Islam berpandangan moderat yang memiliki keterkaitan dengan citra Islam di Indonesia, yaitu Islam moderat. Oleh karena itu, penulis menilai cocok apabila pandangannya digunakan sebagai bahan edukasi dan tolok ukur bidang fiqih dalam penentuan kadar nafkah di masa sulit sekarang ini.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab karangan Wahbah az-Zuhaili, yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah makanan untuk istri adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah tempat tinggal untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami; sedangkan di masa sulit, fasilitas wajib tersebut tidak harus berada di dalam rumah. Nafkah pembantu untuk istri di masa normal adalah wajib bila istri membutuhkan dan suami mampu; namun bila istri tidak membutuhkan atau suami tidak mampu, maka tidak wajib mendatangkan pembantu. Nafkah perabot rumah tangga untuk istri di masa normal adalah upah untuk *baby sitter*, alat-alat pembersih, perkakas makan, peralatan dapur, meja, kursi, serta kebutuhan untuk tidur; sedangkan di masa sulit, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan. Kadar nafkah untuk anak disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat pribadinya. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan karena dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang kadar nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

**Kata kunci :** *Nafkah Keluarga, Wahbah az-Zuhaili, Pandemi Covid-19*

**THE RELEVANCE OF WAHBAH AZ-ZUHAILI'S VIEW ON THE  
LEVEL OF HUSBAND'S OBLIGATION TO PROVIDE HIS FAMILY  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**ABSTRACT**

**Muhammad Ikhsan Setiaji  
NIM. 1717302023**

**Islamic Family Law Study Program  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*As a result of the Covid-19 pandemic, it is difficult for family heads to provide a living. On the other hand, providing for his legal family is obligatory. The author finds that there are wives who ask their husbands to continue to provide a living as normal. This is due to the lack of education about how to behave in a household. Wahbah az-Zuhaili is one of the moderate Islamic thinkers who has a relationship with the image of Islam in Indonesia, namely moderate Islam. Therefore, the author considers it appropriate if his views are used as educational material and a benchmark in the field of fiqh in determining the level of livelihood in today's difficult times.*

*The research that the author does is library research that uses a qualitative approach. The primary data source used in this research is the book written by Wahbah az-Zuhaili, namely Islamic Fiqh Wa Adillatuhu. The data collection method used is the documentation method. The data analysis method used in this research is descriptive analysis method.*

*According to Wahbah az-Zuhaili, the food allowance for the wife is adjusted to the prevailing customs in each region and adapted to the economic capacity of the husband, both in normal times and in difficult times. Clothing for the wife is clothing that is in accordance with what is usually worn by the community and adapted to the economic capacity of the husband, both in normal and difficult times. Living allowance for the wife in normal times is a place to live that is appropriate and equal to the level of the husband's residence with the criteria of a house in which there are mandatory facilities and adjusted to the husband's economic situation; while in difficult times, these mandatory facilities do not have to be in the house. Support for the wife in normal times is obligatory if the wife needs it and the husband can afford it; but if the wife does not need or the husband is unable, then it is not obligatory to bring in a maid. The household furniture for the wife in normal times is wages for a baby sitter, cleaning tools, eating utensils, kitchen utensils, tables, chairs, and the need for sleep; while in difficult times, it is adjusted to the needs and adequacy. The level of living for the child is adjusted to the adequacy of the child's needs and adjusted to the economic capacity of the father. If the father is unable to provide for his child due to economic difficulties, then Wahbah az-Zuhaili mentions several opinions of scholars and does not state his personal opinion. Wahbah az-Zuhaili's view on the level of living in relation to the Covid-19 pandemic is relevant because in Wahbah az-Zuhaili's view it explains the level of living in difficult times, as is the case during the current Covid-19 pandemic.*

**Key words :** provide for the family, Wahbah az-Zuhaili, Covid-19 pandemic

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad'	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad'	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

شَهَادَةٌ - *syahadah*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: عَلَيْكُمْ - *'alaikum*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
... ا...	fathah dan alif	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	$\bar{i}$	i dan garis di atas
و	damah dan wawu	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

أَنْ تَجْمَعُوا - *ang tajma'uu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammad, transliterasinya dalah /t/.

- 2) Ta marbūṭah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْبَيْتَةِ - *al-bayyinah*

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

بَيِّنَةٌ - *bayyinah*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْقُدَّاتُ - *al-qudaatu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	إِنَّكُمْ	<i>innakum</i>
Hamzah di tengah	إِعْدِلُوا	<i>i'dilu</i>
Hamzah di akhir	شُهَدَاءُ	<i>Syuhadaaa'a</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa

dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

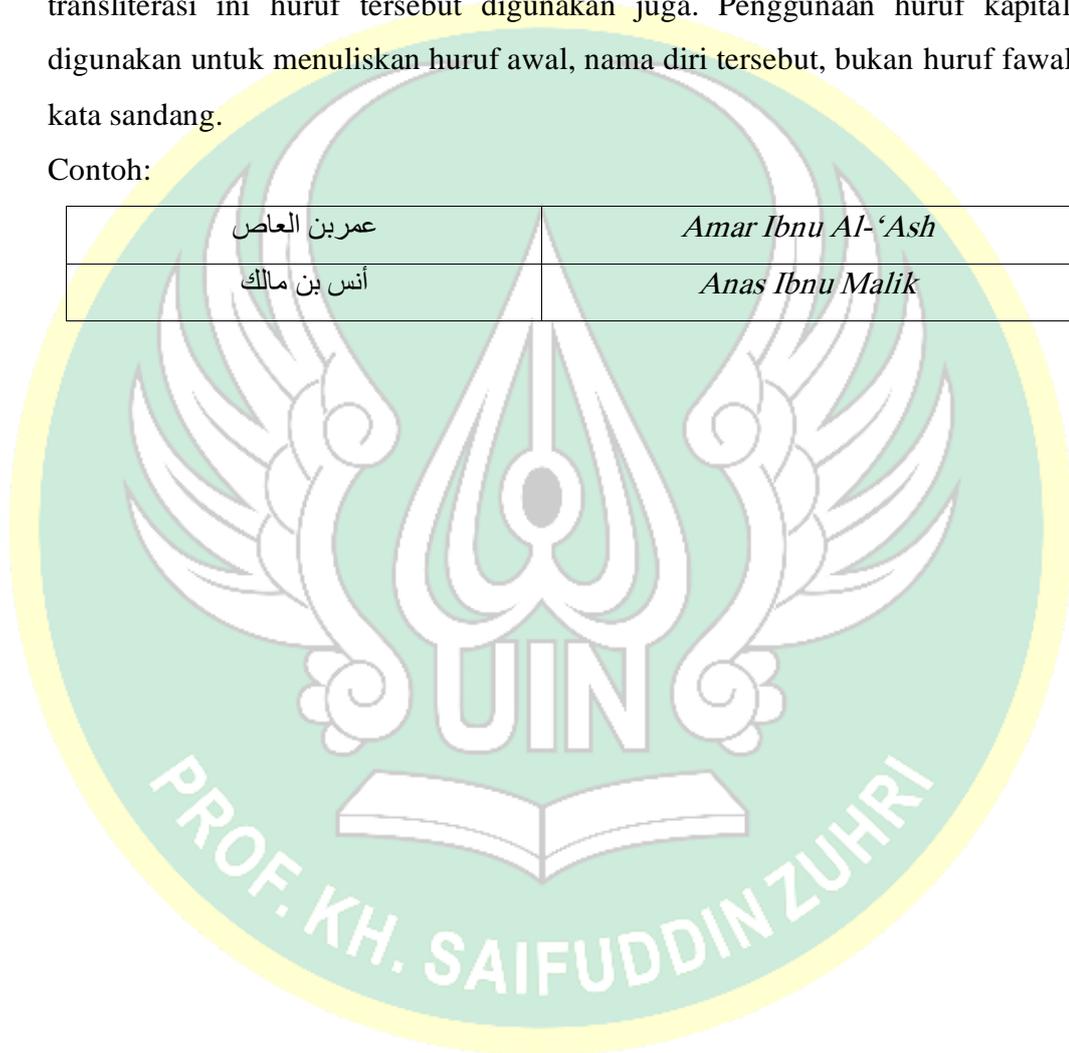
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ : *innallāha khobiirum bimā ta'malūn*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

عمر بن العاص	<i>Amar Ibnu Al-'Ash</i>
أنس بن مالك	<i>Anas Ibnu Malik</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tentu diiringi oleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan.
10. Orang tua tercinta, Muhammad Idris dan Sri Sudaryati yang selama ini tanpa pamrih telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya kepada penulis.
11. Kyai Ahmad Nailul Basith beserta keluarga ndalem pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Uluum yang telah tulus membimbing, mendidik, mengajar dan mendoakan penulis.
12. Keluarga besar dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis.
13. Kawan-kawan Angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam dan kawan-kawan Pondok Pesantren Roudlotul Uluum yang telah banyak memberikan kenangan dan pembelajaran kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan. Aamiin.

Purwokerto, 12 Januari 2022  
Penulis



Muhammad Ikhsan Setiaji  
NIM. 1717302023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data Penelitian .....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN PANDEMI COVID-19**

A. Gambaran Umum Tentang Nafkah .....	16
1. Pengertian Nafkah .....	16

2. Sebab yang Mewajibkan Nafkah .....	18
3. Syarat yang Mewajibkan Nafkah .....	20
4. Kadar Nafkah untuk Istri .....	22
5. Kadar Nafkah untuk Anak .....	26
B. Gambaran Umum tentang Pandemi Covid-19.....	28
1. Pengertian Pandemi Covid-19 .....	28
2. Dampak Pandemi Covid-19 .....	34

### **BAB III : BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI**

A. Latar Belakang Keluarga .....	39
B. Riwayat Pendidikan .....	39
C. Guru-guru .....	41
D. Karya-karya .....	43
E. Corak Pemikiran .....	47

### **BAB IV : ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

A. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Nafkah .....	51
1. Kadar Nafkah untuk Istri.....	51
2. Kadar Nafkah untuk Anak .....	57
B. Relevansi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kadar Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19.....	60

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia merata pada seluruh sektor, baik sektor kesehatan, sosial dan budaya, pendidikan, serta juga ekonomi dan ketenagakerjaan. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh Indonesia sebagai sebuah negara saja, tetapi juga oleh lingkup terkecil dari sebuah negara yaitu keluarga. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat dari kebijakan tersebut ialah menurunnya pendapatan rakyat di sektor ekonomi, bahkan mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk mengurangi kerugian yang dialami, beberapa perusahaan mengambil langkah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Hal ini memang sesuai dengan Pasal 164 dan 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang intinya adalah bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja apabila mengalami kerugian.<sup>1</sup>

Akibat dari langkah tersebut, banyak pekerja yang diberhentikan dan kehilangan pekerjaannya. Walau demikian, masih dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa pekerja yang diberhentikan berhak mendapatkan uang

---

<sup>1</sup> M. Anwar, "Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja di Tengah Covid-19", Jurnal 'Adalah Vol.4 No. 1, 2020, hlm. 99.

pesangon dari perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada pekerjanya yang tidak lagi mendapat upah setelah diberhentikan, dan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai mendapatkan pekerjaan kembali.<sup>2</sup> Namun karena tidak juga kunjung mendapat pekerjaan pengganti, uang pesangon pun habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga mencapai satu titik di mana suami sebagai kepala dan tulang punggung keluarga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Di sisi lain, menafkahi keluarga hukumnya adalah wajib bagi seorang suami. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>3</sup> Bukan hanya istri, suami diwajibkan memberi nafkah pada keluarga berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing.<sup>4</sup> Dalilnya di dalam al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat, di antaranya ialah firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥</sup>

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 207.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2016), hlm. 422.

<sup>5</sup> Kemenag, "Qur'an Kemenag", *quran.kemenag.go.id*, diakses pada 7 Januari 2022.

Pada surat at-Thalaq ayat 6 Allah SWT juga berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.<sup>6</sup>

Adapun dari hadits, di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah tentang jawaban Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh Hakim bin Muawiyah tentang kewajiban suami terhadap istrinya, beliau menjawab :

تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ...

Kamu harus memberinya makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberinya pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.<sup>7</sup>

Bukan hanya dalam Hukum Islam, hukum positif di Indonesia pun menyebutkan hal serupa, seperti dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Persis sama seperti Pasal dan ayat di atas, dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan juga ayat (4) menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan biaya pendidikan bagi anak.

<sup>6</sup> Kemenag, "Qur'an Kemenag", *quran.kemenag.go.id*, diakses pada 7 Januari 2022.

<sup>7</sup> Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 245.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga ada aturan mengenai nafkah, yakni dalam Pasal 107 ayat (2) disebutkan bahwa setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditematinya; dia wajib melindungi istrinya dan memberinya apa saja yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Kewajiban untuk menafkahi berarti juga larangan untuk menelantarkan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan melihat fenomena di atas, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam sudah pasti sejatinya telah mengakomodasi jalan keluar. Islam adalah agama yang relevan dimanapun dan kapanpun, serta tidak saklek hanya terpaku pada satu keadaan. Ciri khas dari hukum Islam di antaranya ialah hukum Islam itu lengkap; ia mencakup segala aspek kehidupan, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan yang terimplementasikan dalam ibadah, dan hubungan dengan sesama manusia yang terimplementasikan dalam muamalah. Hukum Islam itu dinamis; berarti sesuai dengan perkembangan dan mengayomi berbagai kebutuhan manusia yang bergerak maju, serta pantas untuk setiap masa dan tempat. Hukum Islam itu universal; dapat diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan watak dinamis

hukum Islam tersebut. Hukum Islam itu kemanusiaan; karena orientasi hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia bersama-sama.<sup>8</sup>

Walau demikian, penulis menemukan ada istri yang meminta suaminya untuk tetap memberikan nafkah seperti saat keadaan normal tanpa memperdulikan bahwa suaminya baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan mengancam akan mengajukan gugatan cerai apabila permintaannya tidak dituruti. Hal ini didasari oleh sebab minimnya edukasi tentang bagaimana seharusnya setiap anggota keluarga bersikap saat menghadapi masa sulit seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Keadaan pada masa pandemi tidaklah sama dengan masa normal, sehingga penyesuaian harus dilakukan untuk tetap bisa menghadapi dan melewatinya.

Sejalan dengan hal tersebut, ada seorang tokoh Islam di era modern sekarang ini yang sangat dalam ilmunya, khususnya dalam bidang fiqih dan tafsir, berwawasan luas, serta berpandangan moderat. Negara asalnya adalah Suriah dan sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia, beliau adalah Wahbah az-Zuhaili. Beliau menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru. Namun ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Corak terpenting metodologi Wahbah az-Zuhaili adalah metode ijtihadnya yang mengarah pada *taisīr* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Metode ini dapat membebaskan

---

<sup>8</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 190-191.

dari belenggu mazhab tertentu (*fanatis*). Beliau selalu mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab yang ada dalam menggali suatu hukum, sehingga hasil rumusan yang diperoleh bisa komprehensif.

Penulis tertarik dengan pandangan hukum beliau yang khas bercirikan Islam yang moderat, persis sama seperti apa yang ditekankan oleh negara tercinta, tentang pentingnya Islam yang moderat di Indonesia. Terlebih, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Kementerian Luar Negeri Indonesia selama ini mengampanyekan Islam moderat sebagai bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga citra tersebut terkonstruksi di tatanan global.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“Relevansi Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19”**.

## B. Definisi Operasional

Penulis akan memaparkan dan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

### 1. Relevansi

Secara umum, artinya adalah kecocokan, bersangkutan paut, berguna secara langsung.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia’s Foreign Policy”, *Jurnal Studia Islamika* Vol. 23 No. 3, 2016, hlm. 399-434.

## 2. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama, profesor, guru besar, serta pemikir kondang yang berasal dari Damaskus, Suriah. Beliau lahir pada tahun 1932 dan wafat pada tahun 2015 dalam usia 87 tahun. Beliau sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah. Berbagai jabatan penting pernah beliau emban, mulai dari tingkat jurusan, fakultas, hingga menjadi promotor program Magister dan Doktor. Selain itu, beliau juga seorang pendiri majalah dan pembicara berbagai media.

## 3. Nafkah

Menurut syara', nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah yang dimaksud dalam skripsi disini ialah nafkah menurut syara' pada umumnya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam skripsi ini, menafkahi berarti perbuatan memberikan nafkah.

## 4. Keluarga

Sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sedangkan keluarga yang dimaksud

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 23

dalam skripsi ini adalah keluarga batih atau keluarga inti, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah.

#### 5. Covid-19

Penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus jenis baru. Penyakit ini diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini menyerang pernapasan dan telah menyebar dengan masif ke berbagai negara sehingga menjadikannya sebuah pandemi. Virus ini dapat menular melalui percikan bersin dan batuk, dan dapat juga melalui benda yang terkontaminasi percikan dan batuk dari penderita Covid-19. Pandemi ini berkembang sedemikian pesat, sehingga dampak negatif ekonomi mempengaruhi sektor manufaktur, pariwisata, usaha, transportasi, logistik, ritel, real estate, UKM, dan jasa bisnis.<sup>11</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa pandemi Covid-19 ?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap kadar kewajiban yang harus diberikan seorang suami dalam menafkahi keluarganya di masa pandemi Covid-19 dan

---

<sup>11</sup> Melani Kartika Sari, "Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", Jurnal karya Abdi Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 20.

relevansinya melalui penggalian (eksplorasi) data yang bersumber dari berbagai dokumen.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa sulit atau dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga. Juga sebagai bahan edukasi dan gambaran tolok ukur kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa sulit.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarganya, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi oleh Zulkifli Latif, UIN Walisongo Semarang 2018, yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)*”. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tetap berlakunya kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya walaupun dalam keadaan sulit, yakni menjadi

narapidana dan menjadi korban PHK. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa seorang narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yang didapat dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga mereka mendapat upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>12</sup> Sementara penulis memfokuskan tentang kadar kemampuan suami dalam kewajibannya untuk menafkahi keluarganya ketika sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena pandemi Covid-19.

Kedua, Skripsi oleh Okta Vinna Abriyanti, IAIN Metro Lampung 2017, yang berjudul "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*". Skripsi ini membahas tentang kelalaian yang dilakukan seorang suami dalam menafkahi keluarganya ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya dan tidak dibolehkannya menelantarkan keluarga. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan hukum positif,

---

<sup>12</sup> Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>13</sup> Okta Vinna Abriyanti, "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*", Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2017).

sedangkan penulis menggunakan perspektif seorang tokoh yang bukan merupakan hukum positif.

Ketiga, Skripsi oleh Ismaiel Khasan, IAIN Purwokerto 2019, yang berjudul “*Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)*”. Persamaannya dengan skripsi penelitian penulis ialah sama-sama mengambil perspektif dari Wahbah Az-Zuhaili dan juga mengambil sumber kitab yang sama. Perbedaannya terletak pada isi pembahasan, skripsi tersebut membahas tentang nasab dan hak waris, sementara penulis membahas tentang nafkah.<sup>14</sup>

Keempat, Tesis oleh Darmawati, UIN Alauddin Makassar 2014, yang berjudul “*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”. Tesis ini membahas tentang konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah di Kelurahan Gunung Sari Makassar, dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja di luar rumah. Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut terletak pada pembahasan tentang konsep nafkah perspektif hukum Islam. Namun tesis tersebut terfokus pada faktor yang mendasari terjadinya perubahan peran wanita dalam rumah tangga, mencari nafkah di luar rumah, proses kegiatan istri yang bekerja di luar

---

<sup>14</sup> Ismaiel Khasan, “*Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019).

rumah dan apa dampak yang ditimbulkan<sup>15</sup>; sedangkan fokus penulis hanyalah konsep nafkah dan kada kemampuan dalam menafkahi.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2015, yang berjudul “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”. Jurnal ini menyebutkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya.<sup>16</sup> Penulis sepatutnya dengan jurnal tersebut dalam perihal kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Perbedaannya ialah jurnal tersebut tidak mengkorelasikan kewajiban tersebut dengan hal apapun alias dalam keadaan biasa atau normal, sedangkan penulis mengkorelasikan kewajiban tersebut dengan keadaan sulit seperti pandemi Covid-19 sekarang ini.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan secara pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Darmawati, “*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

<sup>16</sup> Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, 2015, hlm. 397.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liblary research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, serta berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada narasi dan dokumen tertulis.<sup>19</sup> Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif karena penelitian dengan pendekatan tersebut sangat kaya dan sarat dengan deskripsi.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Wahbah az-Zuhaili seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *at-Tafsīr al-Munīr*; dan juga kitab-kitab lain seperti *Fiqh Sunnah* dan *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*.

<sup>18</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.272.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa pustaka yang berasal dari buku, jurnal, serta karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang nafkah, khususnya kitab karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Metode ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>21</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 29.

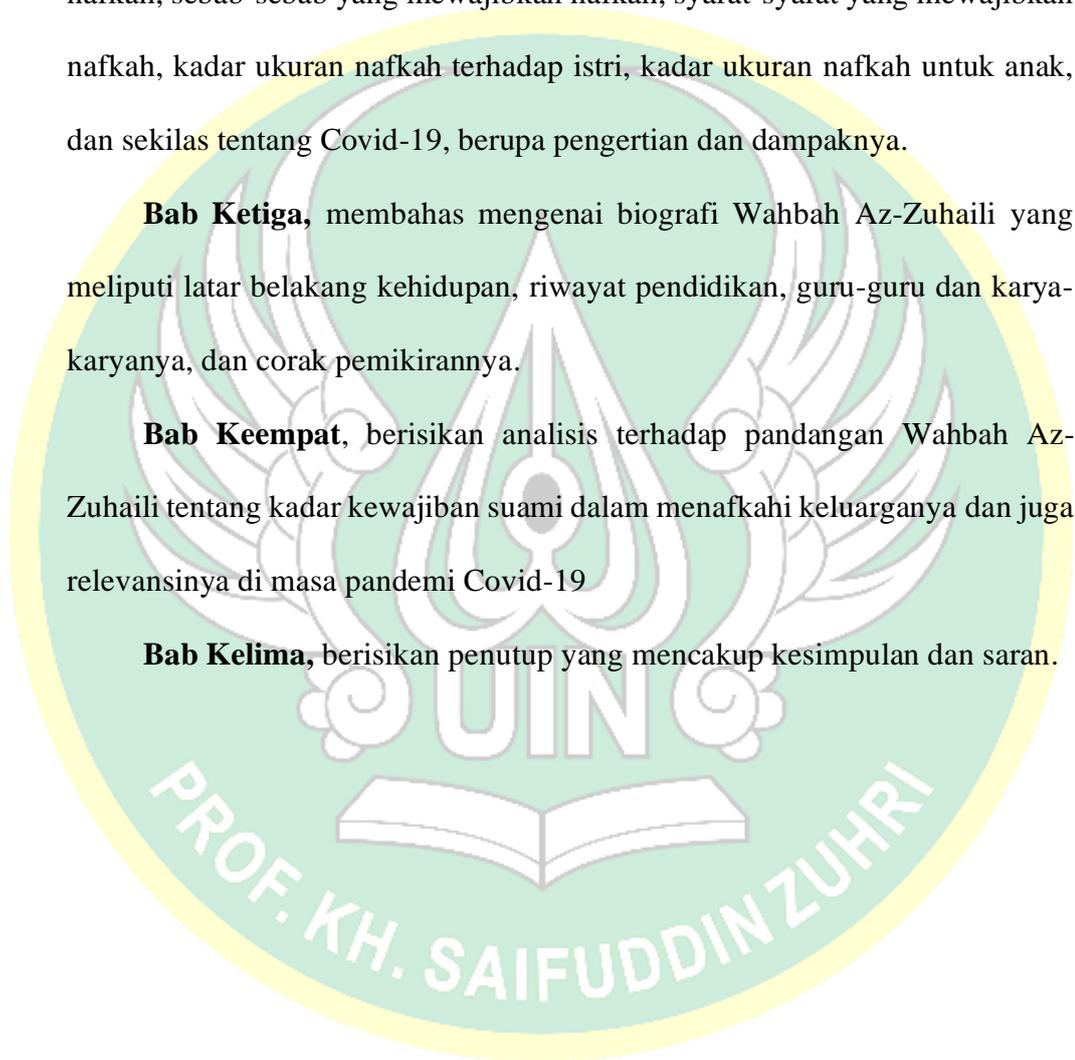
**Bab Pertama**, berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, syarat-syarat yang mewajibkan nafkah, kadar ukuran nafkah terhadap istri, kadar ukuran nafkah untuk anak, dan sekilas tentang Covid-19, berupa pengertian dan dampaknya.

**Bab Ketiga**, membahas mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili yang meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, guru-guru dan karya-karyanya, dan corak pemikirannya.

**Bab Keempat**, berisikan analisis terhadap pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya dan juga relevansinya di masa pandemi Covid-19

**Bab Kelima**, berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN PANDEMI COVID-19

#### A. Gambaran Umum Tentang Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari kosakata bahasa Arab yang berupa *fi'il māḍi sulāṭsi mujarrad* نَفَقَ yang bermakna نَفِدَ , yaitu “habis”.

Bila diubah mengikuti wazan أَفْعَلَ yang merupakan *fi'il māḍi sulāṭsi mazīd bi harf* sehingga menjadi أَفَقَّ , maka bermakna صَرَفَ , yaitu

“membelanjakan”. Sedangkan kata النَّفَقَةُ yang merupakan *isim maṣḍar*

memiliki makna الْمَصْرُوفُ dan الْإِنْفَاقُ yaitu biaya, belanja, dan pengeluaran uang.<sup>22</sup>Arti lainnya ialah barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.<sup>23</sup>

Kata *nafaqah* setidaknya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata, nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan “belanja untuk hidup” atau “uang pendapatan”. Adapun infak diartikan sebagai pemberian sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan.<sup>24</sup> Kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan,

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 463.

<sup>24</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

pakaian, dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.<sup>25</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>26</sup>

Berikut ini ialah beberapa pengertian nafkah secara terminologi dari beberapa ahli fiqih :

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.<sup>27</sup>
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.<sup>28</sup>
- c. Hasan Ayyub mengatakan bahwa nafkah yaitu semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa kata *nafaqah* artinya ialah “mengeluarkan”. Bentuk jamak dari kata *nafaqah* adalah *nafaqāt* yang secara bahasa artinya sesuatu

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), hlm. 1281.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 147.

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), IV: 485.

<sup>29</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian, ketentuannya ialah bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal, termasuk di dalamnya ialah rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>30</sup>

## 2. Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Menurut Sayyid Sabiq, hal yang mewajibkan atas suami untuk memberikan nafkah kepada istri adalah karena berdasarkan akad nikah yang sah. Istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terkait dengan hak suaminya yang berupa hak menikmati kesenangan dengan dirinya, mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh dan mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya.<sup>31</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa Sebab-sebab wajib nafkah ada tiga; yaitu pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Nafkah untuk mereka disebutkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Sebagaimana istri

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: 765.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 147.

menjadi sebab wajibnya nafkah bagi suami, seperti itu juga perceraian menjadi sebab wajibnya nafkah, semisal untuk wanita yang ditalak raj'i dan semacamnya.<sup>32</sup>

Abdul Aziz Muhammad Azzam dengan singkat mengatakan bahwa nafkah untuk istri menjadi wajib adalah karena tiga hal. Pertama, adanya akad yang sah. Kedua, penyerahan diri istri kepada suami. Ketiga, memungkinkannya bersenang-senang.<sup>33</sup>

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah seorang ayah terhadap anak hukumnya wajib karena Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>34</sup>

Artinya, seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa ayah wajib menafkahi anaknya, karena Allah mewajibkan suami menafkahi istri yang ditalaknya selama masa penyusuan, demi kemaslahatan si anak. Wajibnya nafkah anak atas ayah ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan ayahnya adalah orang yang paling dekat dengannya.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, IV: 485.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 212.

<sup>34</sup> Kemenag, "Qur'an Kemenag", *quran.kemenag.go.id*, diakses pada 7 Januari 2022.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Darul Fikri, 2009), I: 568.

Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah demikian itu memudaratkan saya ?” Beliau menjawab : ”Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak menjadi tanggung jawab ayah.

### 3. Syarat yang Mewajibkan Nafkah

#### a. Syarat yang Mewajibkan Nafkah untuk Istri

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa syarat-syarat wajibnya nafkah istri menurut mayoritas ulama ada empat. Pertama, istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya. Kedua, istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Ketiga, akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Keempat, hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah istri ada lima. Pertama, akad nikah dilaksanakan secara sah. Kedua, istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. Ketiga, istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya. Keempat, istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami. Kelima, keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, VII: 769-770.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 148.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, ada beberapa syarat wajib nafkah untuk istri yang dirincikan dalam pandangan berbagai mazhab. Namun ada lima hal yang menjadi kesamaan di antara mazhab-mazhab tersebut. Pertama, akad nikah yang sah. Kedua, istri mampu untuk disetubuhi. Ketiga, istri menyerahkan dirinya sepenuhnya. Keempat, istri tidak membangkang (*nusyuz*). Kelima, tidak ada penghalang apapun antara istri dan suami.<sup>38</sup>

Abdul Aziz Muhammad Azzam menyebutkan bahwa ada empat syarat istri berhak menerima nafkah. Pertama, sahnyalah akad nikah. Kedua, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang. Ketiga, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya. Keempat, istri bisa diajak bersenang-senang.<sup>39</sup>

#### b. Syarat yang Mewajibkan Nafkah untuk Anak

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ada dua syarat yang mewajibkan nafkah untuk anak menurut mayoritas ulama. Pertama, jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin, tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.<sup>40</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, ada beberapa syarat wajib nafkah untuk anak yang dirincikan dalam pandangan berbagai mazhab. Namun

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, IV: 495-499.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 214-215.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 822-823.

ada empat hal yang menjadi kesamaan di antara mazhab-mazhab tersebut. Pertama, anak dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, tidak atau kurang berakal serta tidak mampu bekerja. Kedua, anak berstatus merdeka. Ketiga, ayah mampu dalam menafkahi.<sup>41</sup>

Menurut Mustafa Dieb Bigha, syarat wajib nafkah untuk anak ada empat. Pertama, orang tua dalam keadaan berkecukupan. Kedua, anak belum dewasa dan fakir. Ketiga, anak tidak kuat bekerja. Keempat, anak tidak sehat akalnya.<sup>42</sup>

#### 4. Kadar Nafkah untuk Istri

Sayyid Sabiq berpendapat :

إن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف, أى المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها, وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص

Besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Kemudian beliau menegaskan :

وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال بل المراد تسليم ما يكفى على وجه لا سرف فيه بعد تبين مقدار ما يكفى باخبار المخبرين

Yang dimaksud bukan berarti penentuan hal tersebut diserahkan kepada pihak yang ditanggung nafkahnya (istri) dan dia

<sup>41</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, IV: 511-513.

<sup>42</sup> Mustafa Dieb Bigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hlm. 296.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II*: 151.

mengambilnya sendiri, hingga pada kondisi si pemberi nafkah menolak apa yang dikehendakinya karena khawatir terhadap sikap berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan secukupnya tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada penjelasan mengenai besaran kebutuhan yang mencukupi dari kalangan yang berkompeten.<sup>44</sup>

Istri tidak diperbolehkan untuk membebani suami dengan menuntut nafkah di atas batas kewajaran. Kadar nafkah harus tetap sesuai dengan ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, tempat, dan keadaan mereka berada. Ukuran kewajaran tersebut ialah berdasarkan dengan keterangan dari para ahli, dalam hal ini adalah para ulama dan hakim.

Dari perkataan Sayyid Sabiq tersebut, maka beliau berpendapat bahwa kadar kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kepatutan atau kewajaran yang berlaku umum di waktu, tempat, dan keadaan mereka berada. Kadar kepatutan dan kewajaran tersebut diperoleh dari keterangan para ulama dan hakim.

Kemudian beliau menjelaskan tentang ketentuan kadar nafkah ketika ekonomi suami sedang memburuk :

إذا تغيرت حالة الزوج المالية إلى ما هو أسوأ كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة

Jika keadaan ekonomi suami memburuk, maka suami berhak untuk meminta pengurangan nafkah.<sup>45</sup>

Abdurrahman al-Jaziri membuat rangkuman tentang kadar nafkah seperti berikut :<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II*: 152.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, II*: 155.

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh, IV*: 493-494.

للحنفية رأيان : الرأي الأول : تقدر النفقة بحسب حالهما معا بمعنى أنها تجب لها نفقة الوسط. الرأي الثاني : اعتبار حال الزوج فقط ولا يخفى أن الثاني هو المنضبط في باب الأحكام وحيث كان صحيحا فينبغي الأخذ به

Hanafiyah memiliki dua pendapat. Pertama, nafkah disesuaikan dengan kondisi suami istri. Kedua, mengacu pada kondisi suami saja. Pendapat kedua lebih sesuai dengan hukum. Karena pendapat ini sesuai dengan hukum, maka harus dipraktikkan.

المالكية قالوا : ينظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معا

Malikiyah berpendapat bahwa kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi suami istri.

الشافعية قالوا : فأما الإطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج وأما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي لا بحسب حاله هو

Syafi'iyah berpendapat: untuk makanan dan pakaian, keduanya diukur berdasarkan kondisi suami. Adapun tempat tinggal, ukurannya didasarkan pada kondisi istri.

الحنابلة قالوا : أن المعتبر حال الزوجين معا

Hanabilah berpendapat bahwa standar nafkah mengacu pada kondisi suami istri secara bersamaan.

Dengan demikian, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa yang menjadi acuan dalam penentuan kadar nafkah adalah kondisi suami istri. Namun, Abdurrahman al-Jaziri berdasarkan keterangan di atas mengatakan bahwa pendapat kedua Hanafiyah ialah lebih sesuai dengan hukum, sehingga harus dipraktikkan. Oleh karena itu, beliau mentarjih pendapat tersebut, yakni kadar nafkah mengacu pada kondisi suami saja. Bila suami kaya, suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila sedang, maka nafkah yang diberikan juga sedang. Hal tersebut sama saja, baik dalam keadaan normal maupun sulit.

Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat :

حال الزوج يسرا أو عسرا وتوسطا بينهما فإن كان الزوج موسرا فرض لها نفقة اليسار وإن كان معسرا فرض لها نفقة الإعسار وإن كان متوسط الحال فرض لها نفقة الوسط بين اليسار والإعسار

Kadar nafkah ditentukan berdasarkan pada keadaan suami, baik kaya, miskin, maupun sedang. Kalau suami kaya, maka suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila berekonomi sedang, maka nafkah yang diberikan juga sedang.<sup>47</sup>

لما كانت النفقة تفرض لحاجيات الزوجة وكفايتها في المعيشة فإنه يجب أن يراعى عند تقدير نفقة الزوجة حال الأسعار في الأسواق ارتفاعا وانخفاضا  
Diwajibkannya nafkah adalah karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan untuk mencukupinya dalam urusan penghidupan. Oleh karena itu, maka harus memperhatikan kondisi naik turunnya harga di pasar ketika menentukan kadar nafkah untuk istri.<sup>48</sup>

Menurut beliau, selain disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, kadar nafkah untuk istri juga disesuaikan dengan harga-harga di pasar, begitu juga kebutuhan lainnya. Sehingga apabila harga pasar sedang naik, maka suami harus menambah nafkahnya, dan apabila harga pasar turun, maka suami boleh mengurangi nafkahnya. Itu semua disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, baik dalam keadaan normal ataupun sulit.

##### 5. Kadar Nafkah untuk Anak

Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat :

تقدر نفقة الأولاد الصغار على أبيهم حسب ما يراه القاضى مراعى حال الأب من حيث يساره وارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار ومراعاة الحاجة

<sup>47</sup> Abdul Jalil Ahmad Ali, *Ahkam Al-USrah fi As-Syari'ti Al-Islamiyyah*, (Aleksandria: Al-Isy'a', 2001), hlm. 69.

<sup>48</sup> Abdul Jalil Ahmad Ali, *Ahkam Al-USrah*, hlm. 69.

Nafkah untuk anak yang masih kecil diwajibkan atas ayah dengan mempertimbangkan pendapat hakim terhadap kondisi ekonominya, baik dari segi kelapangannya, taraf standar hidupnya, tingginya harga-harga dan mempertimbangkan kebutuhan.<sup>49</sup>

Kadar kewajiban nafkah ayah untuk anaknya ialah disesuaikan dengan pertimbangan dan ketentuan dari hakim, baik dalam keadaan normal maupun sulit. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan kondisi ekonomi si ayah, taraf standar hidup bagi si anak, serta harga-harga kebutuhan yang sewajarnya bagi si anak.

Sayyid Sabiq berpendapat :

وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر لقله ﷺ لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . قال أحمد : إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال

Sebagaimana nafkah merupakan kewajiban anak yang kaya kepada orangtuanya yang miskin, maka nafkah juga merupakan kewajiban orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: “*Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepantasnya*”. Ahmad berkata: “Jika anak miskin atau tidak memiliki mata pencaharian, maka nafkah baginya tidak gugur dari ayahnya jika dia memang tidak memiliki penghasilan dan harta”.<sup>50</sup>

Sama seperti pendapat beliau tentang kadar nafkah untuk istri, kadar nafkah untuk anak tidak diperbolehkan melebihi batas kewajaran. Kadar nafkah harus tetap sesuai dengan ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, tempat, dan keadaan mereka berada. Ukuran kewajaran tersebut ialah

<sup>49</sup> Abdul Jalil Ahmad Ali, *Ahkam Al-Usrah*, hlm. 142.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), III: 402.

berdasarkan dengan keterangan dari para ahli, dalam hal ini adalah para ulama dan hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak terdapat dalam Pasal 80 dan Pasal 104. Dalam Pasal 80, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>51</sup> Sebagaimana Pasal 104 menyatakan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>52</sup> Selanjutnya, dalam Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan orang tua sebagai penanggungjawab utama yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak.

Ulama sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut

---

42. <sup>51</sup> Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bimas Islam RI, 2018), hlm.

<sup>52</sup> Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 52.

termasuk kebutuhan, jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jika si anak membutuhkan pembantu, maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan.<sup>53</sup>

## B. Gambaran Umum tentang Pandemi Covid-19

### 1. Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas.<sup>54</sup> World Health Organization (WHO) mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi suatu penyakit dan berpotensi sebagian dari mereka akan terkena penyakit tersebut. Pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit atau jumlah korban; akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis.<sup>55</sup> Masih menurut WHO, pandemi adalah peningkatan penularan penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-tiba dan telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar.<sup>56</sup>

Wabah sendiri menurut KBBI adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dan menyerang sejumlah besar orang di daerah

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII*: 828.

<sup>54</sup> Depdikbud, *Kamus Besar*, hlm. 876.

<sup>55</sup> Puti Yasmin, "Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan untuk Virus Corona", *news.detik.com*, diakses 22 Desember 2021.

<sup>56</sup> Loren Elliott, "Arti Hiperendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi", *cnnindonesia.com*, dikases pada 22 Desember 2021.

yang luas.<sup>57</sup> Wabah ialah penyebaran penyakit di masyarakat dengan jumlah orang terjangkit lebih banyak dari biasanya pada komunitas atau musim tertentu. Wabah dapat terjadi secara terus-menerus, mulai hitungan hari hingga tahun. Wabah tidak hanya terjadi pada suatu wilayah, tetapi bisa menyebar ke wilayah lain, bahkan negara lain. Suatu penyakit dapat dinyatakan sebagai wabah apabila penyakit tersebut sudah lama tidak terjangkit di masyarakat, muncul sebagai penyakit baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya, dan baru pertama kali menjangkiti masyarakat suatu daerah.<sup>58</sup>

Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit. Virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan. Penderita akan menurun fungsi paru-parunya setelah melewati serangkaian pemulihan. Selain paru-paru, ginjal juga bisa terdampak, sebagian penderita Covid-19 mengalami gangguan pada ginjal. Pasien Covid-19 juga cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal akut juga bisa menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang

---

<sup>57</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *kbbi.web.id*, diakses pada 22 Desember 2021.

<sup>58</sup> Rohadatul Ais, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, (Tangerang: Makmood Publishing, 2020), hlm. 33.

terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa terserang akibat infeksi dari Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat.<sup>59</sup>

Mengingat Covid-19 ini adalah wabah, maka penyakit ini dapat menular, bahkan dengan tempo yang cepat. Penularan Covid-19 terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kontak dan droplet; penularan Covid-19 terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung maupun kontak erat dengan orang yang terjangkit Covid-19 melalui air liur dan droplet yang keluar dari orang dengan Covid-19 pada saat sedang berbicara, bernyanyi, batuk dan aktivitas lainnya. Penularan melalui droplet dapat terjadi pada jarak kurang lebih 1 meter.
- b. Udara; penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih dalam keadaan infeksius dan dapat bergerak hingga jauh.
- c. Fomit, ialah penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan dan benda yang terkena droplet dari orang yang terjangkit Covid-19.<sup>60</sup>

Covid-19 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan, China pada penghujung tahun 2019.<sup>61</sup> Diawali dengan penemuan kasus pertama di Wuhan, China, lalu makin menyebar ke daerah lain bahkan keseluruhan penjuru dunia. Kasus Covid-19 makin hari mengalami peningkatan angka

---

<sup>59</sup> Idah Wahidah, dkk., “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO) Vol. 11 No. 3, (Desember 2020), hlm. 183.

<sup>60</sup> Arianda Aditia, “COVID-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan”, Jurnal Penelitian Perawat Profesional Vol. 3 No. 4, (November 2021): 655.

<sup>61</sup> Idah Wahidah, dkk., *Pandemik Covid-19*, hlm. 184.

positif dari hampir seluruh negara, tercatat hingga November 2021, terdapat lebih dari 205 juta kasus positif dengan 4,33 juta korban meninggal dunia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan terjadi di Depok pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini kasus positif di Indonesia mencapai 3,75 juta dan 112.000 korban meninggal.<sup>62</sup>

Covid-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan, oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Di antara beberapa upaya pencegahan Covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Vaksin; Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penyebaran pemberian vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat guna membuat imunitas dan mencegah transmisi.
- b. Deteksi dini dan isolasi; Seluruh individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan pasien yang positif Covid-19 harus segera berobat ke fasilitas kesehatan. Bagi kelompok risiko tinggi, direkomendasikan untuk memberhentikan seluruh aktivitas selama 14 hari, pemeriksaan infeksi dan isolasi. Pada kelompok risiko rendah, dihindari melaksanakan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika keluhan memberat. Pada tingkat masyarakat, usaha pencegahan meliputi pembatasan berpergian dan kumpul massa pada acara besar (*social distancing*).

---

<sup>62</sup> Arianda Aditia, *COVID-19: Epidemiologi*, hlm. 655.

- c. Melakukan proteksi dasar; yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai gejala.
- d. Alat pelindung diri (APD); merupakan salah satu metode efektif pencegahan penularan selama penggunaannya rasional. Komponen APD terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung atau face shield, dan gaun nonsteril lengan panjang.<sup>63</sup>

Secara garis besar, Pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh Pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Strategi Promotif

Pemerintah secara proaktif mengajak warga negara untuk meningkatkan imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus Covid-19 ini. Berbagai sumber merilis upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas. Selain itu, Pemerintah juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

---

<sup>63</sup> Adityo Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1, (Maret 2020): 60-61.

#### b. Strategi Preventif

Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Di kala negara lain menerapkan karantina wilayah, Pemerintah Indonesia melalui menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan sebelumnya menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat. PSBB merupakan suatu langkah yang cukup strategis untuk diambil oleh Pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan Covid-19. Individu yang merasa pernah ada kontak dengan pasien yang dinyatakan positif Covid-19 juga harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang nantinya dilakukan serangkaian tes.

#### c. Strategi Kuratif

Ada beberapa pengobatan yang diberikan kepada pasien Covid-19 contohnya adalah dengan pemberian obat yang dahulu pernah dipakai untuk wabah sebelum penyakit Sars-CoV2 seperti obat oseltamivir untuk wabah flu burung. Bagi pasien Covid-19 yang menderita pneumonia dilakukan intervensi medis berupa pemberian antibiotik dan juga mereka diminta mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila pasien menderita gangguan pada hati akan diberikan hepatoprotector yang merupakan senyawa obat yang dapat memproteksi hati dari kerusakan akibat virus. Penggunaan obat yang

sedianya digunakan untuk penyakit tertentu dan sekarang dipakai untuk penyakit lain merupakan hal yang lumrah di dunia medis, istilahnya dikenal sebagai *repurposing drug*.<sup>64</sup>

## 2. Dampak Pandemi Covid-19

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona.<sup>65</sup>

Terkait dampak pada sektor ketenagakerjaan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia. Pertama, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja. Kedua, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Ketiga, perhitungan total kehilangan pekerjaan tergantung pada bagaimana Pemerintah masing-masing negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin. Keempat, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja, seperti sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Kelima, di

<sup>64</sup> Idah Wahidah, dkk., *Pandemik Covid-19*, hlm. 183-185.

<sup>65</sup> Muhyiddin, "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. 4 No. 2, (Juni 2020): 242.

negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dan tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Keenam, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Ketujuh, respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian.<sup>66</sup>

Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah dan PSBB dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Semua negara akan berhadapan dengan kondisi dimana pendapatan negara turun, tetapi di sisi lain negara membutuhkan peningkatan pengeluaran yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan penanganan Covid-19. Saat ini, Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan PSBB. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, Pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan demi untuk mencegah kebangkrutan, terkhusus

---

<sup>66</sup> Muhyiddin, *Covid-19, New Normal*, hlm. 244-245.

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah.<sup>67</sup>

Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, mulai dari yang termiskin hingga yang terkaya, mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin. Selain pendapatan yang menurun, banyak rumah tangga yang pengeluarannya malah meningkat. Hal itu disebabkan oleh kenaikan harga untuk bahan pangan, kebutuhan pokok, dan biaya komunikasi.<sup>68</sup>

Para pencari nafkah utama di sebagian besar rumah tangga tetap bekerja, tetapi sebagian bekerja dalam waktu yang lebih singkat dan dengan penghasilan yang lebih kecil. Beberapa dari pencari nafkah utama berganti pekerjaan. Hampir separuh dari pencari nafkah yang berpindah pekerjaan beralih dari pekerjaan sebagai tenaga kerja yang menerima gaji di bidang formal ke pekerjaan yang kurang terjamin di bidang informal. Separuh dari rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan sebagai sandaran, sehingga beberapa dari mereka ada yang menggadaikan harta benda dan meminjam uang untuk bertahan hidup.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muhyiddin, *Covid-19, New Normal*, hlm. 245-246.

<sup>68</sup> UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, “*Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*”, (Jakarta: t.p., 2021), hlm. 18.

<sup>69</sup> UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, *Analisis Dampak*, hlm. 20-21.

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga dan hampir semua usaha ini terdampak oleh pandemi. Bahkan sebelum pandemi, sebagian besar usaha rumah tangga merupakan unit usaha berskala kecil, yang seringkali mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar. Usaha mikro dan kecil berperan penting bagi pekerjaan dan pendapatan bagi rumah tangga di bidang informal. Karena usaha mikro dan kecil relatif mudah untuk dimulai dan ditutup, banyak orang mencari nafkah dengan menjalankan usaha informal mikro, terutama pada masa krisis ketika ekonomi formal menyusut. Sebagian besar dari mereka yang menjalankan atau bekerja di usaha informal ini menghadapi kondisi kerja yang rentan, tanpa perlindungan sosial dan sering kali dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang buruk. Mereka biasanya memiliki produktivitas yang rendah, tabungan dan investasi yang rendah, dan modal yang lebih kecil.

Kondisi tersebut membuat usaha skala kecil rentan terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah yang sedang berjalan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Keluhan utama adalah pelanggan yang lebih sedikit, pendapatan yang lebih rendah, dan biaya yang lebih tinggi. Salah satu alasan penutupan sebagian besar usaha adalah bahwa usaha ini, terutama yang terpusat di bidang perdagangan ritel, restoran dan akomodasi, yang paling terpukul oleh pembatasan sosial yang diberlakukan untuk membatasi penyebaran virus.<sup>70</sup>

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi perekonomian secara makro, karena dari ekonomi keluarga perputaran uang dapat berjalan

---

<sup>70</sup> UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, *Analisis Dampak*, hlm. 22-23.

dengan lancar. Akibat Covid-19, kegiatan ekonomi menurun dan pengurangan tenaga kerja semakin meningkat. Banyak kepala rumah tangga yang tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Bantuan Pemerintah terbatas, sedangkan setelah itu, keluarga kembali harus dapat bertahan di saat pandemi ini. Keluarga harus memulai kembali untuk memperoleh pendapatan, Hanya saja, untuk memulai pekerjaan mereka kembali dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga menjadi hal yang tidak mudah. Banyak kendala dihadapi, antara lain perlu modal kembali, adanya kepercayaan mitra, pemasaran di saat pandemi dan sebagainya. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan, baik dari eksternal maupun dari internal, secara langsung maupun tidak. Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan dasar ekonomi negara yang kuat pula.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dessy Maulina, “Ketahanan Ekonomi Keluarga di Saat Pandemi Covid-19”, *iesp.ulm.ac.id*, diakses 23 Desember 2021.

## BAB III

### BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

#### A. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap dari Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada 6 Maret 1932 M/1351 H dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Suriah. Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal kesalehan dan ketakwaannya serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa'dah, seorang perempuan yang berpegang teguh dengan syari'at Islam.<sup>72</sup>

#### B. Riwayat Pendidikan Wahbah az-Zuhaili

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah mengenyam dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, beliau bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian beliau melanjutkan di Fakultas Syariah dan bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan

---

<sup>72</sup> Abdul Malik, *“Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu”*, Skripsi (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018), hlm. 39.

Fakultas Syariah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Ketika itu, Wahbah az-Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik *summa cum laude (Martabat asy-Syaraf al-Ula)*.<sup>73</sup>

Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas di benua Eropa. Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.<sup>74</sup>

Setelah itu, gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas

<sup>73</sup> Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), hlm. 18.

<sup>74</sup> Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Humanistika* Vol. 4 No. 2 (Juni, 2018): 58-59.

Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia, khususnya *Nahdlatul Ulama*. Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Suriah, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.<sup>75</sup>

### C. Guru-guru Wahbah az-Zuhaili

Ketika seseorang menjadi tokoh dalam dunia keilmuan, kemudian memiliki prestasi tinggi yang gemilang, tentunya karena adanya andil dari guru yang sudah mengajar dan membimbingnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya.

Di antara guru-guru Wahbah az-Zuhaili ialah:<sup>76</sup>

1. Dalam bidang hadits, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi
2. Dalam bidang teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi

<sup>75</sup> Abdul Malik, *Studi Analisis*, hlm. 41.

<sup>76</sup> Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136.

3. Dalam bidang faraidh dan wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat al-Mardani dan Syaikh Hasan al-Shati
4. Dalam bidang ushul fiqih dan mustholah hadits, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi, Syaikh Musthafa Abdul Khaliq, Syaikh Abdul Ghani, Syaikh Usman Marzuki, Syaikh Zhawahiri al-Syafi'i dan Syaikh Hasan Wahdan
5. Dalam bidang tajwid, beliau berguru kepada Syaikh Ahmad al-Sanaq
6. Dalam bidang tilawah, beliau berguru kepada Syaikh Hamdi Juwajawati
7. Dalam bidang bahasa Arab, beliau berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab
8. Dalam bidang tafsir, beliau berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Jankah al-Maidani
9. Dalam bidang sastra dan Balaghah, beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Syaikh Ali Syamsudin dan Syaikh Subhi al-Kharzan.
10. Dalam bidang sejarah dan akhlak, beliau berguru kepada Syaikh Rasyid Syathi, Syaikh Hikmat Syathi dan Syaikh Madhim Mahmud Nasimi
11. Dalam bidang fiqih perbandingan, beliau berguru kepada Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdul Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Ali Khafif, Syaikh Muhammad al-Banna, Syaikh Muhammad Zafzaf, Syaikh Muhammad Salam Madkur, dan Syaikh Farj al-Sanhuri

12. Dalam pemantapan di bidang fiqih Syafi'i, beliau berguru kepada Syaikh Jad al-Rabb Ramadhan, Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim, Syaikh Muhammad Abdu Dayyin dan Syaikh Musthafa Mujahid

Masih banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya. Perhatian beliau pada berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi juga menjadikan beliau sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa.<sup>77</sup>

#### **D. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar dan tebal. Bukan hanya itu, beliau juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Karya beliau di Bidang al-Qur'an dan 'Ulumul al-Qur'an antara lain ialah :

1. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*
2. *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hamsy al-Qur'ān al-'Azīm*
3. *At-Tafsīr al-Wajīz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'ān al-'Azīz*

---

<sup>77</sup> Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 176.

Karya beliau di Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih di antaranya ialah :

1. *Astar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*
2. *Ushul al-Fiqh al-Islāmi 1-2*
3. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu al-Juz at-Tāsi' al-Mustadrak*
4. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu (8 jilid)*
5. *Al-Wajīz fī Ushul al-Fiqh*

Karya beliau di bidang Hadits dan Ulumul Hadits antara lain ialah :

1. *Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarīfah*
2. *Haqīqatuhā wa Makānatuhā 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah.*

Karya beliau di bidang Akidah Islam antara lain ialah :

1. *Al-Imān bi al-Qadā wa al-Qadr*
2. *Ushul Muqāranah Adyān al-Bad'i al-Munkarah.*

Karya beliau di bidang *Dirāsah Islāmiyyah* antara lain ialah :

1. *Al-Khaṣāiṣ al-Kubrā li Huqūq al-Insān fī al-Islām wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islāmiyyah*
2. *Ad-Da'wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimīn*
3. *al-Manhaj wa al-Wasīlah*
4. *Tabsyīr al-Muslimīn li Gairihim bi al-Islāmi*
5. *Ahkāmuhu wa Dawābiṭuhu wa Adābuhu*
6. *al-Amn al-Gaza'i fī al-Islām*
7. *al-Imām as-Suyūṭi Mujaddid ad-Da'wah ilā al-Ijtihād*

8. *al-Islām wa al-Imān wa al-Ihsān*
9. *al-Islām wa Tahdīyāt al-'Ashri*
10. *at-Taḍākhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyah*

Dari sekian banyak karya beliau dalam bidang fiqih, Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* merupakan karya beliau yang sangat monumental. Di dalamnya berisi persoalan-persoalan fikih yang dibahas secara mendalam dan selalu melihat dari sudut pandang berbagai mazhab. Menariknya, meskipun berisi berbagai perspektif dalam menjawab setiap persoalan, beliau tidak pernah sama sekali dalam kitabnya memberikan kesimpulan bahwa salah satu pendapat adalah yang paling benar dan pendapat yang lain salah.<sup>78</sup>

Kitab ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun akal. Kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari empat mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāḥ al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (al-Qur'an, as-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu mazhab tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan

---

<sup>78</sup> Saief Alemdar, "Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu Wahbah Az-Zuhaili: Kitab Fikih Paling Lengkap", *tarbawia.net.*, diakses 14 Desember 2021.

beberapa pendapat mazhab selain mazhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu mazhab, beliau berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam mazhab tersebut. Kitab ini juga memerhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-*takhrīj* dan di-*tahqīq*.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fihiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu mazhab dengan mazhab lain. Keunggulan lain dari kitab ini adalah kitab ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, beliau tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini. Beliau juga akan menyebutkan pendapat yang rajih, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Beliau juga berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqh kontemporer.<sup>79</sup>

Kitab *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* telah banyak dicetak oleh banyak penerbit di berbagai negara. Salah satu terbitan yang populer di Indonesia adalah yang diterbitkan oleh Gema Insani yang terdiri dari 10 jilid. Rincian pembahasan perjilidnya ialah Jilid 1 berisi pengantar tentang ilmu fikih, tokoh-tokoh mazhab fikih, niat, bersuci, dan shalat. Jilid 2 membahas tentang shalat

---

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), X: 21-22.

wajib, shalat sunnah, zikir setelah shalat, qunut dalam shalat, shalat jama'ah, shalat jama' dan qashar. Jilid 3 membahas tentang puasa, i'tikaf, zakat, haji dan umrah. Jilid 4 membahas tentang sumpah, nadzar, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, kurban dan aqiqah, serta teori-teori fiqih. Jilid 5 membahas tentang hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli dan akad penyewaan. Jilid 6 membahas tentang jaminan, pengalihan utang, gadai, paksaan dan kepemilikan. Jilid 7 membahas tentang sistem ekonomi islam, pasar keuangan, hukum hadd zina, qadzaf dan pencurian. Jilid 8 membahas tentang jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, serta Pemerintahan dalam islam. Jilid 9 membahas tentang pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri, li'an, zihar dan masa iddah. Jilid 10 membahas tentang hak-hak anak, wasiat, wakaf dan warisan.<sup>80</sup>

#### **E. Corak Pemikiran Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang pemikir yang memiliki integritas keilmuan di beberapa bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. Pemikiran az-Zuhaili berarah moderat, yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf dan pemikiran modern.<sup>81</sup>

Beliau menyebutkan bahwa hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at dan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual, serta tidak ada perubahan dan

---

<sup>80</sup> Anonim, "Buku Fiqih Islam Wa Adilatuhu 1 Set 10 Jilid", *toko-muslim.com.*, diakses 14 Desember 2021.

<sup>81</sup> Abdul Malik, *Studi Analisis*, hlm. 52.

perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku. Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurut beliau, yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Sehingga jika terdapat predikat *al-musyarri'* (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat, maka kata tersebut merupakan ucapan *majāzi*. Menurut beliau, jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syari'at, maka harus diterima dengan segera; dan apabila bertentangan dengan hukum syari'at, maka harus ditolak dan haram untuk dilaksanakan.<sup>82</sup>

Wahbah az-Zuhaili memiliki gagasan tentang pembaruan hukum syari'at. Yang dimaksud pembaruan dan ijtihad menurut beliau bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya, ketika berbicara tentang Islam dan syariat, maka yang ada hanyalah Islam yang satu, baik di masa dahulu, kini dan akan datang. Beliau berpendapat bahwa Islam tidak menerima pembaruan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' yang ada dan menggantikannya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan modernisasi. Beliau menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Menurutnya, pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan

---

<sup>82</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 16-17.

kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik.<sup>83</sup>

Corak terpenting metodologi Wahbah az-Zuhaili dalam setiap karyanya adalah metode ijtihadnya yang lebih mengarah pada *taisīr* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Metode ini akan dapat membebaskan dari belenggu mazhab tertentu (fanatik). Hal ini karena beliau merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'aṣṣub*) mazhab.<sup>84</sup>

Di antara keistimewaan corak pemikiran Wahbah az-Zuhaili, baik dalam segi penulisan, sistematika, maupun dalil-dalilnya dalam setiap karyanya adalah sebagai berikut:

1. Menguraian syariat Islam yang didasarkan atas dalil yang benar dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan akal.
2. Menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat mazdhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) dan kadang-kadang dengan mazhab lain.
3. Berupaya memperluas berbagai hukum fiqih mengenai persoalan pokok, menimbang asumsi-asumsi hukum fiqih dari setiap mazhab yang lain, sehingga terjadi sikap saling menghormati.

---

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma*, hlm. 78.

<sup>84</sup> Abdul Malik, *Studi Analisis*, hlm. 53.

4. menggunakan ungkapan yang sederhana dan mudah, dijelaskan dengan contoh, dan sistematika yang mudah dipahami oleh orang yang hidup pada abad ini.

Jika beliau tidak melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat ulama, beliau lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat mayoritas ulama, alasannya ialah dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam *pentarjihan*. Jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, beliau melakukan *qiyas* dengan mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan *'illat*. Kemudian beliau menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu, beliau juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Namun demikian, beliau tidaklah berijtihad hanya dengan mengandalkan akal rasional belaka, akan tetapi selalu berdasarkan dalil *naqli* yang ada di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Bahkan, dalam kitabnya yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami*, beliau menyebutkan metode-metode *istinbath* hukum *'aqli* yang tidak mencapai derajat *muttafaq 'alaih*, seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *māzhah aṣ-ṣahabi*, *saddu az-zāra'i*, dan *istishab*.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1994), hlm. 8.

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

#### A. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Nafkah

##### 1. Kadar Nafkah untuk Istri

الحقوق الواجبة بالزوجية هي سبعة: الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت وخدام إن كانت الزوجة ممن تخدم

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan istri ada tujuh macam: makanan, lauk, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri membutuhkan.<sup>86</sup>

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makanan dan sejenisnya (meliputi lauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), dan perabot rumah tangga (meliputi alat pembersih) dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Makanan dan Sejenisnya

Mengenai takaran nafkah makanan, terdapat perbedaan di kalangan ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili berikut ini :

قال الجمهور غير الشافعية : تقدر بالكفاية

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan itu dikira-kirakan dengan kadar secukupnya.<sup>87</sup>

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد أو بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah, atau bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 766.

<sup>87</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 798.

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 799.

Apabila kadar makanan dalam sehari yang menjadi kebiasaan di suatu daerah adalah tiga piring nasi beserta dengan lauk tahu tempe, maka itulah yang menjadi kadar wajib nafkah makanan yang harus dipenuhi oleh suami. Artinya, kadar tersebut adalah ukuran minimal yang harus diberikan suami dalam memberi makan istrinya. Namun apabila suami tidak mampu memberikannya, maka disesuaikan dengan kemampuan suami.

Ulama Syafi'iyah sendiri berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Jika suami kaya, maka nafkahnya adalah dua mud per hari; jika miskin, maka nafkahnya adalah satu mud; dan jika berekonomi sedang, maka nafkahnya adalah satu mud setengah.<sup>89</sup>

والراجح لدى هو رأى الجمهور

Menurut saya, yang *rājih* adalah pendapat mayoritas ulama.<sup>90</sup>

Pendapat yang *rājih* (kuat) menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu kadar minimal wajib nafkah makanan untuk istri disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. Hal ini juga karena dalam hadits tentang Hindun, Rasulullah tidak menyebutkan jumlah atau bilangan, tetapi hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Sehingga, kadar minimal nafkah makanan ditentukan lewat kebiasaan, bukan ukuran angka tertentu.

<sup>89</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII*: 799-800.

<sup>90</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII*: 800.

Kemudian Wahbah az-Zuhaili memberikan keterangan tambahan seperti berikut :

وذهب الحنفية والشافعية : الى أنه تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا

Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan dan pakaian ditentukan dari keadaan ekonomi suami, baik dalam keadaan mudah (normal) maupun sulit.<sup>91</sup>

وهذا القول هو الراجح لدى

Pendapat inilah yang menurut saya yang lebih *rajih*.<sup>92</sup>

Sehingga menurut beliau, baik dalam keadaan normal maupun sulit, kadar nafkah makanan untuk istri ditentukan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.

#### b. Pakaian

Dalam menentukan kadar nafkah pakaian, Wahbah az-Zuhaili berpatokan pada hadits tentang Hindun, yaitu *bi al-ma'rūf*. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه

Pakaian yang sesuai dengan *'urf* adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat.<sup>93</sup>

Sehingga nafkah pakaian yang wajib diberikan suami kepada istrinya menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat.

<sup>91</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 801.

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 801.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 802.

Adapun pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat adalah *qāmīṣ*, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan; kemudian celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan dan menutup aurat; kemudian kerudung, yaitu kain yang menutup kepala; kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.<sup>94</sup>

هي مقدره بالإتفاق حتى عند الشافعية بكفاية الزوجة

Standar nafkah pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan (keadaan ekonomi suami dalam memberi) kecukupan bagi istri.<sup>95</sup>

Sama seperti makanan, kadar nafkah pakaian ditentukan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Semisal jika kaya, maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus; jika miskin, maka dari bahan yang kasar; dan yang berekonomi sedang juga sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting ialah tidak kurang dari batas minimal nafkah pakaian wajib seperti yang sudah disebutkan di atas.

### c. Tempat Tinggal

ويكون المسكن كالطعام والكسوة ملائمة حالة الزوج المالية لقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) أي بحسب سعتكم وقدرتكم المالية

Nafkah berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian dipenuhi sesuai dengan keadaan ekonomi suami, karena Firman Allah SWT: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.* Maksudnya ialah sesuai dengan kemampuan ekonomi kalian.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 802-803.

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 802.

<sup>96</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 803.

Dari keterangan tersebut, maka Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ukuran nafkah tempat tinggal untuk istri adalah sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami. Suami tidak boleh menempatkan istrinya di tempat yang berbeda keadaannya dengan tempat suami, walaupun mereka satu rumah. Nafkah tempat tinggal untuk istri juga disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Oleh karenanya, apabila suami kaya, maka hendaknya memiliki rumah sendiri; bila miskin, maka menyewa; dan bila berekonomi sedang, maka disesuaikan dengan kesanggupannya.

واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملا على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشور, وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيرا

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar mandi, dapur dan lain-lain. Bagian-bagian rumah tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin.<sup>97</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kriteria kadar nafkah tempat tinggal untuk istri adalah rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Namun apabila suami miskin, maka fasilitas-fasilitas tersebut tidak harus berada di dalam rumah, dengan artian boleh terletak di luar rumah atau boleh menggunakan fasilitas umum.

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 803-804.

d. Pembantu jika Istri Membutuhkan

اتفق الفقهاء على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرا، وكانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، ولا تخدم نفسها لكونها من ذوى الأقدار أو مريضة

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah pembantu jika suami kaya dan istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit.<sup>98</sup>

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah berupa pembantu karena istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau karena sakit. Hal tersebut tergantung dari kemampuan suami dan kebutuhan istri. Bila suami mampu dan istri membutuhkan, maka wajib mendatangkan pembantu, namun bila suami tidak mampu atau istri tidak membutuhkan, maka tidak wajib.

أما إن كان الزوج معسرا فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته لأن الخادم ليس ضروريا

Adapun jika suaminya miskin, maka ia tidak berkewajiban mendatangkan pembantu untuk istrinya karena pembantu bukanlah sesuatu yang pokok.<sup>99</sup>

Bila ekonomi suami dalam keadaan sulit, maka menurut Wahbah az-Zuhaili mendatangkan pembantu untuk istri hukumnya tidak wajib, karena pembantu bukanlah hal yang pokok. Istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai dengan kemampuan.

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 805.

<sup>99</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 806.

#### e. Perabot Rumah Tangga

اتفق الفقهاء على وجوب أجره القابلة وآلات التنظيف واختلفوا في أدوات التجميل ومتاع البيت

Para ulama sepakat atas wajibnya upah *baby sitter* dan alat-alat pembersih, namun mereka berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan (perabot) rumah.<sup>100</sup>

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili berpendapat mengikuti sepakatnya ulama, yakni wajib bagi suami untuk membayar upah *baby sitter* dan memberikan nafkah berupa alat-alat pembersih.

الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد

Suami yang kaya sesuai dengan kekayaannya, dan suami yang miskin juga menyesuaikan dengan pendapatannya.<sup>101</sup>

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pemenuhan perabot rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Sehingga ketika dalam keadaan sulit, maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak perlu dipenuhi. Namun bila suami mampu, maka tidak mengapa memenuhi kebutuhan tersebut.

#### 2. Kadar Nafkah untuk Anak

اتفق الفقهاء على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدره بقدر الكفاية من الخبز والإدام والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال المنفق

Para ulama sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusui sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 807.

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 808.

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 828.

Dari keterangan tersebut, maka Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa kadar nafkah untuk anak yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal disesuaikan dengan kecukupan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya.

لأنها وجبت للحاجة فتقدر بقدر الحاجة وقد قال النبي ﷺ لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية

Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan, jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun : *Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu.* Artinya, penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak disesuaikan dengan kecukupan.<sup>103</sup>

Sejalan dengan pendapat beliau tersebut, dalam kitab tafsir al-Munir, beliau menafsiri surat al-Baqarah ayat 233 tentang nafkah anak, beliau juga berkata :

والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أى بالمتعارف فى عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. والإنفاق يكون على قدر غنى الزوج  
Nafkah wajib yang berupa makanan dan pakaian itu diberikan secara makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syariat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pemberian nafkah ini disesuaikan kadarnya dengan kekayaan suami.<sup>104</sup>

Dari keterangan tersebut, maka kadar nafkah untuk anak menurut Wahbah az-Zuhaili adalah disesuaikan atas kadar ekonomi ayahnya dengan ukuran sedang. Misal apabila biasanya anak membutuhkan asupan gizi berupa tiga mangkok bubur setiap hari, maka ayah wajib menyediakannya. Begitu juga kebutuhan ASI yang didapat dari ibunya, maka suami wajib

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 828.

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, I: 736.

memberi asupan kepada istrinya supaya dia mampu memproduksi dan memberikan ASI pada anaknya. Semua itu diberikan dengan proporsional, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Adapun apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya, maka terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut :<sup>105</sup>

أما إذا لم يكن الأب موجداً أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك كانت نفقتهم في رأي الحنفية على الموجود من الأصول ذكراً كان أو أنثى إذا كان موسراً

Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut usia atau sejenisnya; maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu.

ورأي المالكية : أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya menjadi kewajiban ayah sendiri, bukan yang lain.

وذهب الشافعية : إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كان عاجزاً وجبت النفقة على الأم

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika tidak ada ayah atau ayahnya lemah, maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya.

وقال الحنابلة : إذا لم يكن للولد الصغير أب وجبت نفقته على كل وارث على قدر ميراثه

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika anak sudah tidak memiliki ayah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili tidak mengungkapkan kecondongan beliau terhadap salah satu pendapat.

<sup>105</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*: 826-827.

## B. RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR NAFKAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Akibat dari pandemi Covid-19, Indonesia saat ini sedang menghadapi masa genting dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, dari yang termiskin hingga yang terkaya mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin. Dalam keadaan normal, seorang suami dituntut harus bisa menafkahi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun, dalam keadaan pandemi seperti saat ini, tentu pemenuhan kebutuhan pokok mengalami gangguan dikarenakan pencari nafkah mengalami penurunan pendapatan.

Dengan demikian, keadaan pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai penyebab kesulitan ekonomi. Sehingga berlaku kaidah fiqih induk, yaitu المشقة تجلب التيسير (*kesulitan mendatangkan kemudahan*). Alasan kemudahan dari keadaan pandemi Covid-19 adalah kesulitan umum (*'umūm al-balwā*). Dengan alasan tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam keringanan, seperti pengguguran, pengurangan, penggantian, mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya, mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya, pemberian kemurahan dan perubahan.<sup>106</sup>

<sup>106</sup> Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, hlm. 71-75.

Oleh sebab itu, penulis akan merinci pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah untuk istri dan anak, serta menghubungkannya dengan pandemi Covid-19 sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah pandangan beliau relevan atau tidak bila dikaitkan dengan keadaan di masa pandemi Covid-19.

#### 1. Kadar Nafkah untuk Istri

##### a. Makanan dan Sejenisnya

Takaran minimal nafkah makanan untuk istri menurut Wahbah az-Zuhaili adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Jika kadar makanan dalam sehari yang menjadi kebiasaan di suatu daerah adalah tiga piring nasi beserta dengan lauk tahu dan tempe, maka itulah kadar minimal yang harus diberikan oleh suami. Namun apabila suami tidak mampu memberikannya disebabkan menurunnya penghasilan akibat dari pandemi Covid-19, maka kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kemampuan suami. Misal bila dalam sehari suami hanya mampu memberikan dua piring nasi dengan lauk kerupuk, maka dia telah menunaikan kewajibannya, karena memang hanya itulah kemampuannya.

##### b. Pakaian

Nafkah pakaian yang wajib diberikan suami kepada istrinya menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Adapun pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat

adalah *qamīṣ*, celana, kerudung, kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya. Jika suami mampu memberikan nafkah pakaian kepada istrinya sesuai dengan yang umum dipakai oleh masyarakat, yaitu *qamīṣ*, celana, kerudung dan sepatu; serta memiliki kelapangan ekonomi sehingga dia mampu membelikan pakaian dengan bahan yang halus; maka dia sudah menunaikan kewajibannya, sekalipun hanya membelikan pakaian dengan bahan biasa. Namun apabila suami mengalami penurunan penghasilan akibat dari pandemi Covid-19 sehingga dia tidak mampu membelikan pakaian baru dan hanya bisa membelikan pakaian bekas dengan bahan yang kasar, maka dia telah menunaikan kewajibannya, karena memang hanya itulah kemampuannya.

#### c. Tempat Tinggal

Ukuran nafkah tempat tinggal untuk istri menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Beliau juga menambahkan kriteria kadar nafkah tempat tinggal untuk istri adalah rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Bila suami tergolong mampu untuk membeli rumah sendiri, maka wajib baginya untuk membeli rumah, terlebih bila dia memiliki banyak anak dan membutuhkan rumah yang besar dengan banyak ruangan. Namun apabila suami berekonomi lemah karena terdampak pandemi Covid-19 sehingga penghasilannya hanya mencukupi dirinya dan keluarganya untuk tinggal di rumah kontrakan, maka dia wajib

mengontrak dan tidak perlu menyediakan rumah sendiri karena hanya itulah kemampuannya. Intinya, tempat tinggal istri mengikuti tempat tinggal suami.

d. Pembantu

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah berupa pembantu karena istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau karena istri sedang sakit. Namun bila ekonomi suami sedang dalam keadaan sulit karena penghasilannya menurun akibat dari pandemi Covid-19, maka menurut Wahbah az-Zuhaili mendatangkan dan menggaji pembantu untuk bekerja kepada istri hukumnya tidak wajib, karena pembantu bukanlah hal yang pokok. Apabila sebelumnya suami telah mempekerjakan pembantu untuk istrinya, maka tidak mengapa untuk memecatnya. Istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai dengan kemampuan.

e. Perabot Rumah Tangga

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa wajib bagi suami untuk membayar upah *baby sitter* bila mempekerjakannya dan memberikan nafkah berupa alat-alat pembersih kepada istri. Di antara yang juga merupakan hal wajib adalah perkakas makan, peralatan dapur, meja, kursi, serta kebutuhan untuk tidur. Adapun perabot yang tidak wajib dipenuhi karena masih menjadi perselisihan ulama adalah alat-alat kecantikan. Sehingga ketika dalam keadaan sulit seperti pandemi Covid-

19 sekarang ini, maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak perlu dipenuhi. Namun bila suami mampu, maka tidak mengapa memenuhi kebutuhan tersebut.

## 2. Kadar Nafkah untuk Anak

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa kadar nafkah untuk anak yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Misal apabila biasanya anak membutuhkan asupan gizi berupa tiga mangkok bubur setiap hari, maka ayah wajib menyediakannya. Begitu juga kebutuhan ASI yang didapat dari ibunya, maka suami wajib memberi asupan kepada istrinya supaya dia mampu memproduksi dan memberikan ASI pada anaknya.

Jika seorang ayah mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi Covid-19 dan tidak mampu mencukupi nafkah untuk anaknya, maka ada beberapa pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili. Menurut Hanafiyyah, tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu. Menurut Malikiyyah, nafkah itu hanya menjadi kewajiban ayah sendiri, bukan yang lain. Menurut Syafi'iyah, nafkahnya ditanggung oleh ibunya. Menurut Hanabilah, nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya. Wahbah az-Zuhaili sendiri tidak mengungkapkan kecondongan beliau terhadap salah satu pendapat.

### 3. Relevansi Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Nafkah di Masa Pandemi Covid-19

Dari pandangan Wahbah az-Zuhaili di atas, semua pendapat beliau tentang kadar nafkah selalu mengacu pada kemampuan ekonomi suami. Pendapat-pendapat beliau juga dikuatkan oleh pendapat ulama lain, seperti Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan Abdul Jalil Ahmad Ali.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan. Jika keadaan ekonomi suami memburuk, maka suami berhak untuk meminta pengurangan nafkah. Sama seperti kadar nafkah untuk istri, kadar nafkah untuk anak tidak diperbolehkan melebihi batas kewajaran. Kadar nafkah harus sesuai dengan ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, tempat, dan keadaan. Ukuran kewajaran tersebut ialah berdasarkan dengan keterangan dari para ahli, dalam hal ini adalah para ulama dan hakim.

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri mengacu pada kondisi suami saja. Bila suami kaya, suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila sedang, maka

nafkah yang diberikan juga sedang. Hal tersebut sama saja, baik dalam keadaan normal maupun sulit.

Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri ditentukan berdasarkan pada keadaan suami, baik kaya, miskin, maupun sedang. Kalau suami kaya, maka suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila berekonomi sedang, maka nafkah yang diberikan juga sedang. Selain disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, kadar nafkah untuk istri juga disesuaikan dengan harga-harga di pasar, begitu juga kebutuhan lainnya. Kadar kewajiban nafkah ayah untuk anaknya ialah disesuaikan dengan pertimbangan dan ketentuan dari hakim, baik dalam keadaan normal maupun sulit. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan kondisi ekonomi si ayah, taraf standar hidup bagi si anak, serta harga-harga kebutuhan yang sewajarnya bagi si anak.

Semua pendapat ulama di atas selaras dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan juga menguatkan pandangan beliau yang menyatakan bahwa kadar nafkah selalu mengacu pada kemampuan ekonomi suami.

Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan. Alasan kerelevansian tersebut menurut penulis adalah karena dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, beliau tidak hanya menjelaskan tentang kadar nafkah di masa normal, tapi juga menjelaskan kadar nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pertama, Wahbah az-Zuhaili memberikan rincian dalam menentukan kadar nafkah untuk istri berupa nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu dan perabot rumah tangga. Nafkah makanan untuk istri adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah tempat tinggal untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain, serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami; sedangkan di masa sulit, fasilitas wajib tersebut tidak harus berada di dalam rumah dan boleh menggunakan fasilitas umum. Nafkah pembantu untuk istri di masa normal adalah wajib bila istri membutuhkan dan suami mampu; namun bila istri tidak membutuhkan atau suami tidak mampu, maka tidak wajib mendatangkan pembantu. Nafkah perabot rumah tangga untuk istri di masa normal adalah upah untuk *baby sitter*, alat-alat pembersih, perkakas makan, peralatan dapur, meja, kursi, serta kebutuhan untuk tidur; sedangkan di masa sulit, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan.

Dalam menentukan kadar nafkah untuk anak, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat pribadinya. Beberapa pendapat ulama tersebut ada yang mengatakan bahwa tanggung jawab nafkahnya tetap ada pada ayahnya, atau ditanggung oleh keluarga jalur ke atas yang masih ada, atau ditanggung oleh ibunya, atau ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.

Kedua, pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan. Alasan kerelevansian adalah karena dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, beliau tidak hanya menjelaskan tentang kadar nafkah di masa normal, tapi juga menjelaskan kadar nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

## **B. Saran**

Sebagai muslim yang moderat, dalam melaksanakan syari'at tidak boleh melupakan *maqashid as-syariatnya*. Agama tidak semata soal halal dan haram, tapi sarat berbagai pesan moral yang kadang dilupakan. Syari'at merupakan sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ais, Rohadatul. *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang: Makmood Publishing, 2020.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Bigha, Mustafa Dieb. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Ghafur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kemenag. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bimas Islam RI, 2018.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu X*. Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Kitab**

- Ali, Abdul Jalil Ahmad. *Ahkam Al-Usrah fi As-Syari'ti Al-Islamiyyah*. Aleksandria: Al-Isy'a', 2001.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah IV*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah II*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah III*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VII*. Damaskus: Darul Fikri, 1985.
- az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir I*. Beirut: Darul Fikri, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami II*. Damaskus: Darul Fikri, 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Darul Fikri, 1994.

## Jurnal

- Aditia, Arianda. "COVID-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan". *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. Vol. III, No. 4, 2021, 655.
- Anwar, M. "Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja di Tengah Covid-19", *Jurnal 'Adalah*. Vol. IV, No. 1, 2020, 99.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. XVII, no. 66, 2015, 397.
- Muhyiddin, "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol. IV, No. 2, 242.
- Sari, Melani Kartika. "Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri". *Jurnal karya Abdi*. Vol. IV, no. 1, 2020, 20.
- Susilo, Adityo. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. VII, No. 1, 2020, 60-61.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. "A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy", *Jurnal Studia Islamika*. Vol. XXIII, no. 3, 2016, 399-434.
- Wahidah, Idah. dkk. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. XI, No. 3, 2020, 183.
- Yunus, Moch. "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Humanistika*. Vol. IV, No. 2, 2018, 58-59.

## Karya Ilmiah

- Abriyanti, Okta Vinna. "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)". *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

Khasan, Ismaiel. "Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)". *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019.

Latif, Zulkifli. "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Malik, Abdul. "Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu". *Skripsi*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.

UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia". *Penelitian Kolektif*. . Jakarta: t.p., 2021.

#### **Internet**

Alemdar, Saief. "Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu Wahbah Az-Zuhaili: Kitab Fikih Paling Lengkap". *tarbawia.net*.

Anonim, "Buku Fiqih Islam Wa Adilatuhu 1 Set 10 Jilid". *toko-muslim.com*.

Elliott, Loren. "Arti Hiperendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi". *cnnindonesia.com*.

Kemenag, "Qur'an Kemenag", *quran.kemenag.go.id*.

Maulina, Dessy. "Ketahanan Ekonomi Keluarga di Saat Pandemi Covid-19". *iesp.ulm.ac.id*.

Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". *kbbi.web.id*.

Yasmin, Puti. "Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan untuk Virus Corona". *news.detik.com*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kitab At-Tafsir Al-Munir (karya Wahbah az-Zuhaili)

الْبَيْتُ (٢) - البَيْتُ: ٢٣٣ / ٢

٧٣٦

والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. والإنفاق يكون على قدر غنى الزوج وحال الزوجة في رأي المالكية.

ودلت الآية على أن الحضانة للأم، وهو حق لها، وبه أخذ مالك وأبو حنيفة، ومدة الحضانة عند مالك في الغلام إلى البلوغ، وفي الفتاة إلى الزواج. وقال الشافعي وأحمد: إذا بلغ الولد ثمان سنين، وهو سن التمييز، خيّر بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم العلوم ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والفتاة، بدليل تخيير النبي ﷺ ولداً حيثئذ، فلحق بأمه، كما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة.

ويظل الحق للأم بالحضانة ما لم تتزوج اتفاقاً كما سبق بيانه، قال ابن المنذر: «وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على ألا حقّ للأم في الولد إذا تزوجت» وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي، وقال مالك: إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها، حتى يدخل بها زوجها.

ولا فرق في رأي الحنفية بين الذمية والمسلمة في أحقية الأم بالحضانة إذا افترق الزوجان بطلاق. وقال مالك والشافعي: الولد مع المسلم من الزوجين.

وإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزواج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه نُظِر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعدئذ أخذه.

وتحرم المضارّة بين الزوجين وغيرهما؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولقوله تعالى: ﴿لَا تُضَاكِرْ وَاٰلِدَةً﴾ أي لا تأب الأم أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع، كما بينا.

ودل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على وجوب نفقة الأقارب،

Kitab al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Karya Wahbah Az-Zuhaili)

## الفصل الأول الأدلة الشرعية

الدليل في اللغة : المرشد والمهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي ، خير أو شر ، وفي اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، مثل حدوث العالم ، بالنظر في أحوال العالم من تغير وتقلب وفناء ، ووجوب الصلاة بالنظر في دلالة النصوص الشرعية عليه ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [ البقرة : ٤٣/٢ ] ، فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمراً مثلاً إلى مطلوب خبري ، وهو التصديق بأن هذا الأمر يفيد الوجوب ؛ لأنه أمر بإقامة الصلاة ، والأمر بإقامتها يفيد وجوبها ، فكل من ( العالم ) و ( أقيموا الصلاة ) هو الدليل عند العلماء .

والدليل الشرعي : كل ما يستفاد منه حكم شرعي عملي ، سواء بطريق القطع ، أي العلم واليقين ، أم بطريق الظن ، أي غلبة الظن ، لذا كان الدليل نوعين : قطعي الدلالة وظني الدلالة .

والأدلة نوعان : أدلة متفق عليها بين جمهور العلماء ، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وأدلة مختلف فيها وأشهرها سبعة : هي الاستحسان ، والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح ، والاستصحاب ، والعرف ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، وسد الذرائع .

والأدلة المتفق عليها واجبة الاتباع ، ولكنها مرتبة في درجة الاستدلال بها : الكتاب ثم السنة ، ثم الإجماع ، ثم القياس . ودليل وجوب اتباعها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (karya Wahbah az-Zuhaili)

### المطلب الثالث - كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها :

تشمل النفقة الزوجية ما يأتي :

- ١- الطعام والشراب والإدام .
- ٢- الكسوة .
- ٣- المسكن .
- ٤- الخدمة إن لزمها أو كانت ممن تخدم .
- ٥- آلة التنظيف ومتاع البيت .

وقد نصت المادة ٧١ من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة بوجود نفقات التطبيب والعلاج :

- ١- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
- ٢- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

### الواجب الأول - الطعام وتوابعه :

قرر الفقهاء<sup>(١)</sup> أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوها، ولا تجب الفاخرة .

ما تقدر به نفقة الطعام : قال الجمهور غير الشافعية : تقدر بالكفاية ، أي بما يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب ، لقول النبي ﷺ هـند : « خذي ما يكفيك

(١) البدائع ٢٣/٤ - ٢٥ ، فتح القدير : ٣٢٢/٣ وما بعدها ، الدر المختار : ٨٨٦/٢ ، ٨٩٤ - ٨٩٧ ، ٨٩٩ ، ٩٠٥ ، القوانين الفقهية : ص ٢٢١ وما بعدها ، الشرح الصغير : ٧٣١/٢ وما بعدها ، ٧٣٩ ، بداية المجتهد : ٥٤/٢ ، مغني المحتاج : ٤٢٦/٣ - ٤٢٩ ، المهذب : ١٦١/٢ - ١٦٢ ، المغني : ٥٦٤/٧ - ٥٦٧ ، ٥٧١ ، كشاف القناع : ٥٣٢/٥ وما بعدها .

وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، وإنما باجتهادها في التقدير، ولأن الله تعالى قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقال النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، وكل هذه الأدلة صريحة في إيجاب قدر الكفاية. ولا يصح تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدر، بدليل عدم وجوب الأدم فيها.

وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة، فليس لها أن تطلب منه تقديراً معيناً لتنفق هي بنفسها، فإن ثبت تقصيره، رفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه النفقة، ويرجع في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء.

ولا يشترط فيها الحب، وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرف كالخبز والإدام.

ويجب في النفقة تسليم الطعام، وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرها بالقبض من الزوجة، وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثمن أو النقود عنه، لتنفق على نفسها، وهو ما يجري عليه القضاء الآن، لأنه أضبط وأيسر. وقال الحنابلة: لا يملك الحاكم فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين.

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد، أو بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، من رخص وغلاء، وشباب وهرم، وشتاء وصيف.

وإذا قدر القاضي النفقة، ثم تغير حال الزوج يساراً أو إعساراً، زاد القاضي نفقة اليسار في المستقبل، أو نقصها.

وقال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج

يساراً وإعساراً؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الشخص الواحد مدٌّ<sup>(١)</sup> من الحبوب، والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل، فقال تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ فاعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً منها مال يجب بالشرع، ويستقر في الذمة.

فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام، وعلى المعسر مدٌّ، وعلى المتوسط مدٌّ ونصف، واحتجوا لهذا التفاوت بقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان، وهو في كفارة الأذى من إزالة شعر أو ظفر في الحج، وأقل ما وجب له مدٌّ في نحو كفارة الظهار، فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان؛ لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل وهو مد؛ لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد، ويتقنع به الرغيب، وعلى المتوسط ما بينهما دفعاً للضرر عنه.

والراجح لدي هو رأي الجمهور، بدليل ما قال الأذرعى الشافعي: لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفاً في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسياً واتباعاً.

وأما الأدم عند الشافعية فيجب أدم غالب كزيت وسمن وجبن وتمر وخل، وفاكهة لمن اعتادتها، ولحم بحسب يسار الزوج وإعساره كعادة البلد وتقدير القاضي.

حال من تقدر به نفقة الطعام: للفقهاء رأيان في كيفية تقدير نفقة الطعام.

أ- ذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه تقدر بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراً،

(١) الأصح أن المد بتقدير الشافعية  $\left(\frac{2}{7} 171\right)$  درهم (مائة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع الدرهم، والمد يساوي ٦٧٥ غراماً، والدرهم العربي (٢,٩٧٥) غم.

ومراعاة منصب المرأة وحال البلاد، لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدِر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله﴾ وللحديث السابق: «خذي ما يكفيك» وذلك عند الحنابلة وقت عقد الزواج، واعتبار حال الزوجين للجمع بين الأدلة، ورعاية لكل من الجانبين، وهو الأولى؛ لأن الآية راعت حال الزوج، والحديث راعى كفاية الزوجة بالمعروف. فإن كانا موسرين فالواجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فالواجب نفقة الإعسار، وإن تفاوت حالهما فالواجب نفقة الوسط بين الموسرين والمعسرين.

قال المالكية: والوسط من النفقة بالأندلس: رطل ونصف في اليوم من قمح أو شعير أو ذرة أو قطنية على حسب الحال.

ب- وذهب الحنفية والشافعية: إلى أنه تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال الزوج يساراً وإعساراً، للآية السابقة: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ ولقوله ﷺ: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبّحوهن»<sup>(١)</sup>، ولأن النفقة واجبة على الزوج، وقد رضيت الزوجة بحاله، ويقصد من كلمة «المعروف» في حديث هند تحديد الواجب على الزوج.

وهذا القول هو الراجح لدي، عملاً بما نصت عليه الآية صراحة، وهو ما أخذت به القوانين في سورية ومصر، وفيه مرونة وعدالة؛ لأن القاضي له تعديل النفقة إذا تغيرت أحوال الزوج من الإعسار إلى اليسار وبالعكس.

المدة التي تقدر بها نفقة الطعام: تقدر نفقة الطعام في رأي الحنفية والمالكية<sup>(٢)</sup> بحسب ما يناسب الزوج من الأصلح والأيسر في الدفع يومياً أو أسبوعياً

(١) رواه أبو داود عن معاوية القشيري (نيل الأوطار: ٢٢٢/٦).

(٢) الدر المختار وابن عابدين: ٨٩٤/٢، الشرح الصغير: ٧٣٨/٢.

أو شهرياً أو سنوياً، فالعامل المحترف تقدر نفقته باليومية أو بالأسبوع، والموظف بالشهر، والأغنياء أصحاب الثروة بالسنة، وتدفع النفقة مساء كل يوم لليوم التالي، أو في نهاية الأسبوع كالصناع الذين لا يقبضون أجرهم إلا في آخر الأسبوع، أو في بدء الشهر أو آخره بحسب قبض الرواتب الوظيفية، أو سنة بسنة للأثرياء.

وقال الشافعية والحنابلة: تدفع النفقة بطلوع شمس كل يوم؛ لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز.

### الواجب الثاني - الكسوة:

أجمع العلماء<sup>(١)</sup> على أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها؛ لأنها لا بد منها على الدوام، ولقوله عز وجل: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقول النبي ﷺ «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقوله عليه السلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» والكسوة بالمعروف: هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه.

وهي مقدرة بالاتفاق حتى عند الشافعية بكفاية الزوجة؛ للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم، وليست مقدرة بالشرع، وتقدر باجتهاد الحاكم، فيفرض لها على قدر كفايتها، على قدر يسرها وعسرها، وما جرت عادة أمثالها به من الكسوة، فلاموسرة ثياب رفيعة من حرير وكتان جيد، وللمعسرة ثياب غليظة من قطن وكتان، وللمتوسطة ما بينهما.

وأقل ما يجب من الكسوة قميص (ثوب مخيط يستر جميع البدن) وسراويل (وهو

(١) البدائع: ٢٣/٤ وما بعدها، الدر المختار: ٨٩٣/٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٢٢، مغني المحتاج: ٤٢٩/٢؛ ٤٣٣ وما بعدها، المغني: ٥٦٨/٧، الشرح الصغير: ٧٣٨/٢، المهذب: ١٦٢/٢، كشاف القناع: ٥٣٤/٥، المغني: ٥٧٢/٧.

ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة) وخمار أو مقنعة (وهو ما يغطي به الرأس) ومداس أو مكعب (وهو مداس الرجل من نعل أو غيره).

ويجب لها الكسوة في كل سنة مرتين: صيفية وشتوية، لتجدد الحاجة في الحر والبرد، وتكون كسوة الشتاء والصيف بما يناسبها بالاتفاق من غطاء ووطاء في الشتاء بما يناسبه، والصيف بما يناسبه بحسب العرف والعادة.

وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام، وتملك بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي.

وقال الشافعية والحنفية: تدفع الكسوة في كل ستة أشهر؛ لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة. فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة، لم يجب عليه بدلها، كما لا يجب عليه بدل الطعام إذا نفذ قبل انقضاء اليوم.

### الواجب الثالث - المسكن:

يجب للزوجة أيضاً مسكن لائق بها<sup>(١)</sup> إما بملك أو كراء أو إعارة أو وقف، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ أي بحسب سعتكم وقدرتكم المالية وقوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وحفظ المتاع. وذكر الشافعية أن الواجب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لا التملك، أما المستهلك كطعام فيجب فيه التملك.

ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: ﴿مَنْ وَجَدَكُمْ﴾، وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:

(١) فتح القدير: ٣٣٤/٣ وما بعدها، الدر المختار: ٩١٢/٢، ٩١٤، الشرح الصغير: ٧٢٧/٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢٢، معني المحتاج: ٤٣٠/٣، ٤٣٢، المهذب: ١٦٢/٢، المغني: ٥٦٩/٧.

١- أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية السابقة: ﴿من وُجِدكم﴾.

٢- أن يكون مستقلاً بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وهذا عند الحنفية؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجب الله تعالى مقروناً بالنفقة، وإذا وجب حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به؛ لأن السكن المشترك يمنعها معايشة زوجها والاستمتاع بها، ولأنها لا تأمن على متاعها. والحد الأدنى للسكن عند المالكية وغيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقها، بشرط قرره المالكية وبعض الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في نفس الشقة (الطابق) زوجة ثانية؛ لأن سكنى المرأة مع زوجها يؤدي إلى الإضرار بها.

فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو فعل.

وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة، فإذا كانت الزوجة شريفة (وهي ذات القدر) فلها الامتناع من السكنى مع أقاربه، ولو الأبوين في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها وشؤونها الخاصة، إلا إذا شرط الزوج عليها عند العقد أن تسكن معهم، فليس لها الامتناع من السكنى معهم إلا إذا حصل منهم الضرر من سكنها معهم أو الاطلاع على شؤونها وعوراتها.

وأما إن كانت الزوجة وضيعة (وهي التي لا قدر لها)، فللزوجة أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة، إلا إذا اشترطت حين العقد ألا يسكن معها أحد من أقارب الزوج، أو حصل لها ضرر منهم.

وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج ولو كان صغيراً غير مميز إلا إذا رضي الزوج بالسكنى. وأجاز المالكية أن يسكن معها ولد صغير من غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرها، وكان الزوج يعلم به عند الزواج، أو لم يعلم به ولم يكن له حاضنة غيرها. وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار

كبيرة خالية من السكان ومرتفعة الجدران ، فيلزم الزوج مؤنسة تؤنس الزوجة على ما اختاره الحنفية والحنابلة .

٣- أن يكون المسكن مؤثماً مفروشاً في رأي الجمهور غير المالكية : بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة ، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب والطبخ من قِدر (آلة طبخ) وقِصعة (آلة أكل) وكوز (إبريق) وحِجَّة (آلة شرب) ونحوها حسب العادة مما لا غنى لها عنه كمغرفة . وما تغسل فيه ثيابها وأدوات الإضاءة ؛ لأن المعيشة لا تتم بدون المذكور ، فكان من المعاشرة بالمعروف .

وقال المالكية الذين يوجبون على الزوجة الجهاز المتعارف في حدود المهر المقبوض قبل الدخول : لا يكلف الزوج بتأثيث المنزل ، بل المكلف هو الزوجة .

واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشر ، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان ، بشرط كون الجيران صالحين .

#### الواجب الرابع - نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم :

اتفق الفقهاء<sup>(١)</sup> على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسراً ، وكانت المرأة ممن تُخدم في بيت أبيها مثلاً ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف ، ولأن كفايتها واجبة عليه ، وقال تعالى : ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ . والأولى للموسر إخدام زوجته التي تخدم نفسها لأنه معاشرة بالمعروف .

(١) البدائع : ٢٤/٤ ، فتح القدير : ٣٢٧/٣ - ٣٢٩ ، الدر المختار : ٩٠١/٢ ، بداية المجتهد : ٥٤/٢ ، الشرح الصغير : ٧٣٤/٢ ، مغني المحتاج : ٤٣٢/٣ وما بعدها ، المهذب : ١٦٢/٢ ، المغني : ٥٦٩/٧ وما بعدها ، غاية المنتهى : ٣٣٤/٣ ، كشاف القناع : ٥٣٧/٥ وما بعدها .

ولا يجب لها في رأي الجمهور (أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد) أكثر من خادم واحد؛ لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، فتتحقق الكفاية بواحد، ولا ضرورة إلى اثنين، والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: تفرض النفقة لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح الخارج.

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة أهلاً لذلك، وقضى لها عند التنازع مع الزوج بخادمتها؛ لأنه أطيب لنفسها، إلا لريبة في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا.

والخادم: هو من يحمل له النظر إلى المرأة، بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في أغلب أحواله، فلا يسلم من النظر. ويجوز في الصحيح عند الحنابلة: أن يكون الخادم من أهل الكتاب؛ لأن استخدامهم مباح، ولأن الصحيح عندهم إباحة النظر لهم.

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام، مثل نفقة امرأة المعسر في رأي الحنابلة، إلا أنه لا يجب لها المشط والدهن لرأسها والسدر؛ لأن ما ذكر يراد للزينة والتنظيف، ولا يراد من الخادم.

ومذهب الشافعية: تلزم نفقة الخادمة كالزوجة، وجنس طعامها جنس طعام الزوجة؛ وهو مدّ على معسر وكذا متوسط على الصحيح، ومد وثلاث على موسر، ولها كسوة تليق بحالها، ولها أدم على الصحيح، لكن ليس لها آلة تنظيف، إلا إن كثرت وسخ وتأذت بقمّل، فيجب لها ما يزيله.

أما إن كان الزوج معسراً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته؛ لأن الخادم ليس ضرورياً، وعلى الزوجة أن تخدم نفسها ما استطاعت.

### الواجب الخامس - آلة التنظيف ومتاع البيت :

اتفق الفقهاء<sup>(١)</sup> على وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيف، واختلفوا في أدوات التجميل ومتاع البيت . فقال الحنفية : يجب على الزوج آلة طحن وخبز وأنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ، وكذا سائر أدوات البيت كحصير ولبُد وطفنسة (بساط صوف) وما تنتظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وصابون وسِدْر ودهن وخطمي على عادة أهل البلد ، ويجب عليه مداس رجلها وما تغسل به ثيابها وبدنها ، وينقل لها ماء الغسل من الجنابة ، ويجب لها ماء الوضوء . وأما أجرة القابلة فعلى من استأجرها من زوجة وزوج ، فإن جاءت القابلة بلا استئجار ، قيل : تجب عليه ، لأنه مؤنة الجماع ، وقيل : تجب عليها كأجرة الطبيب . وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع بعد الحيض والرائحة الكريهة ، أما الخضاب والكحل فلا يلزمه ، بل هو على اختياره ، ولا تجب لها الفاكهة والقهوة والدخان .

وقال المالكية : تجب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد ، فيفرض لها ماء الشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء ، وزيت الأكل والادّهان ، والوقود من حطب أو غيره على حسب العادة ، وما يصلح الطعام من ملح وبصل وغيرهما ، واللحم في كل أسبوع مرة من غير الفقير ، لا كل يوم ، أما الفقير فعلى حسب قدرته .

وتجب عليه أجرة القابلة ؛ لأنها من متعلقات الولد ، والغطاء والوطاء في الشتاء والصيف بما يناسبها بحسب العرف والعادة ، وحصير الفرش ، وليس لها بيع جهازها إلا بعد مضي أربع سنين ، ولا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفرش ، فإنه يلزم به ؛ لأنه ضروري .

(١) الدر المختار : ٨٩٢/٢ ، الشرح الصغير : ٧٣٣/٢ وما بعدها ، ٧٢٨ ، القوانين الفقهية : ص ٢٢٢ ، المهذب : ١٦١/٢ ، مغني المحتاج : ٤٢٧/٣ ، ٤٣٠ - ٤٣٢ ، المغني : ٥٦٧/٧ وما بعدها ، كشاف القناع : ٥٣٤/٥ - ٥٣٦ ، غاية المنتهى : ٢٣٣/٣ .

وتجب عليه أيضاً أدوات الزينة التي تتضرر المرأة بتركها ككحل ودُهْن من زيت أو غيره كحناء إذا كانا معتادين، لا غير معتادين، ولا يجب عليه ما لا تتضرر المرأة بتركه، كما لا يجب لها المشط والمكحلة وباقي أثاث البيت، لأنها ملزمة بأثاث المنزل وحاجاته بعد قبض صداقتها.

والمقرر لدى الشافعية: أنه يجب آلة تنظيف كمشط ودُهْن وما تكنس به الدار، وما تغسل به الرأس والبدن، وأجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس، لا حيض واحتلام في الأصح. ولها آلات الأكل والشرب والطبخ، وعلى الزوج الطحن والعجن والخبز في الأصح، ولها مفروشات النوم من فراش ومخدة ولحاف، وما تقعد عليه من لبْد وحصير ونحوهما. ولا يجب لها الكحل والخضاب وما تزين به إلا إذا طلبه الزوج. وأما الطيب فيلزمه إن كان لقطع السهوكة (الرائحة الكريهة).

وقرر الحنابلة: أنه يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر وصابون ونحوهما مما تغسل به رأسها وتنظف بدنها وبيتها، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض أو نفاس وحنابة ونجاسة وغسل ثياب. ويجب عليه الخضاب والحناء إن طلبه منها للزينة، ولا يجب عليه إن لم يطلبه؛ لأنه يراد للزينة، وعليه الطيب لقطع أثر الحيض والعرق والرائحة الكريهة، ولا يلزمه ما يراد للتلذذ والاستمتاع أو التجميل والزينة.

ويجب كل ما تحتاجه للنوم من فراش ولحاف ومخدة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد، وما تحتاجه للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسة، وما لا بد منه للطبخ كأعوان الدار ونحوه، الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد.

فعليه وحده نفقة أولاده، لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له ..﴾ الذي يفيد حصر النفقة فيه، ولأنهم جزء منه، فنفقتهم وإحيائهم كنفقة نفسه.

أما إذا لم يكن الأب موجوداً، أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، كانت نفقتهم في رأي الحنفية على الموجود من الأصول ذكراً كان أو أنثى إذا كان موسراً، فتجب على الجد وحده إذا كان موسراً، أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وللجد أو الأم إذا كان الأب موجوداً معسراً غير مريض مرضاً مزمنياً الرجوع على الأب في حال يساره، ويكون ما أنفقته دينياً على والدهم. كما يجوز الرجوع عليه إذا أمر القاضي بالإنفاق.

وإذا وجد الجد مع الأم فعليهما النفقة بنسبة ميراثهما، فيكون على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. وإذا كان هناك جد وأم أم، فعلى الجدة السدس وعلى الجد الباقي، بنسبة ميراثهما. وإذا كان الجد مع الجدتين: أم الأم وأم الأب، فعلى الجدتين السدس مناصفة بينهما، وعلى الجد الباقي، بمقدار ميراثهما.

وإن كان أقارب الولد غير وارثين، بأن كانوا من ذوي الأرحام، فالنفقة على أقربهم درجة. وإن اتحدت درجاتهم، كانت النفقة عليهم بالسوية.

وإن كان بعض الأقارب وارثاً، والآخر غير وارث، كانت النفقة على الأقرب، وإن لم يكن وارثاً، فإن تساوا في درجة القرابة، وجبت النفقة على الوارث دون غيره.

ورأى المالكية: أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره؛ لأن النبي ﷺ قال لرجل سأله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم به» ولم يأمره بإنفاقه على غير هؤلاء.

وذهب الشافعية: إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كان عاجزاً، وجبت النفقة على

الأم، لقوله تعالى: ﴿ لا تضارّ والده بولدها ﴾ ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم، وولادتها مقطوع بها، أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد؛ لأن الجدة كالأم، والجد كالأب في أحكام الولادة.

وإذا استوت درجة القرابة واستحقاق الإرث وجبت النفقة على المتساوين؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما. وإن تفاوتت درجة القرابة فالأصح أن أقربهما تجب النفقة عليه، وارثاً كان أو غيره، وإن استوى قريبهما، يقدم الوارث في الأصح. فإن كان هناك أم وجد أبواب، فالنفقة كلها على الجد في الأصح، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. وإن كان للفرع أجداد وجدات يدلي بعضهم ببعض فالنفقة على الأقرب منهم. وإن لم يدل بعضهم ببعض فتلزم النفقة بالقرب.

وقال الحنابلة في ظاهر المذهب: إذا لم يكن للولد الصغير أب، وجبت نفقته على كل وارث على قدر ميراثه، لقوله تعالى: ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ ثم قال: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. وسأل رجل النبي ﷺ قال: « من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك » وفي لفظ: « ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً، ورحماً موصولاً<sup>(١)</sup> » وهذا نص في المطلوب؛ لأن النبي ﷺ ألزمه الصلة والبر، وكون النفقة من الصلة جعلها حقاً واجباً. فإن كان للولد وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه:

فإن كان للولد الصغير أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة؛ لأنها يرثانه، والله تعالى قال: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ والأم وارثة، فكان عليها بالنص.

(١) رواه أبو داود عن كليب بن منقعة عن جده بلفظ « ... ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة » (نيل الأوطار: ٢٢٧/٦).

وإن كانت جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ، وعلى هذا يكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة ههنا سدس الميراث، فعليها سدس النفقة، وكما أن الباقي للأخ، فكذلك الباقي من النفقة عليه.

وإن اجتمع أبوا أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة. وإن اجتمع أبوا أب، فعلى أم الأب السدس، والباقي على الجد. وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء. وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفقة بينهم أثلاثاً. وقال الشافعي: النفقة على الجد في هذه المسائل كلها إلا المسألة الأولى، فالنفقة عليها بالسوية.

#### المطلب الرابع- مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها:

اتفق الفقهاء<sup>(١)</sup> على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدره بقدر الكفاية من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال المنفق وعوائد البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة، وقد قال النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

وإن احتاج الولد المنفق عليه إلى خادم يخدمه، فعلى الوالد إعدامه؛ لأنه من تمام كفايته.

وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته عند الشافعية والحنابلة؛ لأنها من تمام الكفاية. ولا تجب نفقة زوجة الابن على المذهب عند الحنفية. وتسقط نفقة الزوجة عند المالكية في حال إعسار الزوج.

(١) البدائع: ٢٨/٤، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣، المهذب: ١٦٧/٢، المغني: ٥٩٥/٧، مغني المحتاج: ٤٤٩/٣، الشرح الصغير: ٧٥٣/٢ - ٧٥٤.

Kitab Fiqih as-Sunnah (Karya Sayyid Sabiq)

كانت أو يتيمة . بكرأ كانت أو ثيباً . حرة كانت أو أمة . على قدر حاله ،<sup>(١)</sup> .  
قال : وقال أبو سليمان ، وأصحابه ، وغيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة من حين  
المقد عليها .. وأفتى الحَكَمُ بن عَتَيْبَةَ - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة -  
هل لها نفقة ؟ ...

قال : نعم .

قال : ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة ، إنما هو شيء روي عن  
النخعي والشعبي ، وحامد بن أبي سليمان ، والحسن ، والزهري ... وما نعلم لهم حجة ، إلا  
أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع . فإذا منعت الجماع مُنعت النفقة . انتهى بتصرف قليل .

تقدير النفقة وأساسه :

إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها ، وكان هو قائماً بالنفقة عليها ، ومتولياً إحضار  
ما فيه كفايتها ، من طعام ، وكسوة ، وغيرها - فليس للزوجة أن تطلب فرض نفقة ؛  
حيث أن الزوج قائم بالواجب عليه .

فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته ، أو أنه تركها بلا نفقة ، بغير حق -  
فلهذا أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام ، والكسوة ، والمسكن ... وللقاضي أن يقضي  
لها بالنفقة ، ويلتزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها .

كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف<sup>(٢)</sup> ، وإن لم يعلم الزوج ؛ إذ إنه  
منع الواجب عليه وهي مستحقة له ، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه .  
وأصل ذلك ما رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود والنسائي ، عن عائشة  
- رضي الله عنها .

أن هنداً قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني  
وولدي ، إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ؟  
فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » .

وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف ، أي :  
المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة ،  
والأمكنة ، والأحوال ، والأشخاص .

وقد رأى صاحب الروضة الندية : أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه  
الزوجة ، فيدخل فيه الفاكهة ، وما هو معتاد من التوسعة في الأعياد ، وسائر الأشياء

(١) المحلى ج ١٠ . (٢) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الاخذ .

التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة ، بحيث يحصل الضرر بفارقتها ، أو التضجر ، أو التكدر .

قال : ويدخل فيه الأدوية ونحوها ، وإليه يشير قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات : إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه . والرزق يشمل ما ذكرناه .. ثم ذكر رأي بعض الفقهاء في عدم وجوب ثمن الأدوية ، وأجرة الطبيب ، لأنه يراد حفظ البدن كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار . ورجح دخول العلاج في النفقة ، وأنه واجب فقال : وقال في الغيث : الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبهه النفقة .

قال : وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله ﷺ : « ما يكفيك » ، وتحت قوله تعالى : « رزقهن » ، فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ « ما » والثانية عامة ؛ لأنها مصدر مضاف . وهي من صيغ العموم . واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق .

قال : وبمجموع ما ذكرنا ، يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة ، هو ما يكفيه بالمعروف ، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة ، وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال ، بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه ، بعد تبين مقدار ما يكفي باخبار المخبرين ، أو تجريب المخبرين . وهو معنى قوله ﷺ « بالمعروف » أي : لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير .

نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه ، إذا كان من أهل الرشد ، لا إذا كان من أهل السرف ، والتبذير ، فإنه لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة ؛ لأن الله تعالى يقول :

« وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ » .

ثم قال : ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمرداً ومن له النفقة ليس بندي رشد - أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له ، أو إلى رجل عدل . انتهى .  
ومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائر ما تنتظف به .

« وقالت الشافعية : أمما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكه (١) - لزمه لأنه يراد للتنظيف ، وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع ، لم يلزمه ، لأنه حق له ، فلا يجبر عليه .

(١) الرائحة الكريمة .

يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها ، وكسوتها ، وسكنها ، حسب حالة الزوج عسراً ويسراً .

### تغير الأسعار أو تغير حال الزوج المالية :

إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض ، أو تغيرت حالة الزوج المالية ، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة ، أو إلى نقص ، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ .

ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات :

فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة ، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها . وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة .

وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة ، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها .

وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ ، كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة .

### الخطأ في تقدير النفقة :

إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة حسب حالة الزوج ، من العسر أو اليسر — كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير ، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها ، وكسوتها ، مع ملاحظة حالة الزوج .

### دين النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج :

قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ، متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها... ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ، لوجود سببها ، وتوفر شروطها... ثم امتنع عن أدائها تصير ديناً في ذمته . شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

وإلى هذا ذهب الشافعية ، وجرى عليه العمل منذ صدور قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠... فقد جاء فيه :

مادة — ١ — تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكماً ، ديناً في ذمته ، من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه ، بلا توقف على قضاء قاض ، أو تراض بينهما ، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء .

مادة — ٢ — المطلقة التي تستحق النفقة ، تعتبر نفقتها ديناً ، كما جاء في المادة السابقة ، من تاريخ الطلاق .

الإفساد درجات من العقاب لأن إفسادهم متفاوت ، منه القتل ، ومنه السلب والنهب ، ومنه هتك العرض ، ومنه إهلاك الحرث والنسل .  
ومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه ، فليس الحاكم مخيراً في عقاب من شاء منهم بما شاء ، بل عليه أن يعاقب كلا منهم بقدر جرمه ودرجة إفساده ، وهذا هو المدل .

﴿وجزاء سيئة سيئةً مثلها﴾<sup>(١)</sup> ؟

وهذا مذهب الشافعي ، وأحد في أصح الروايات عنه وقول أبي حنيفة — على تفصيل في ذلك — وقد ناقش الكاساني في البدائع<sup>(٢)</sup> رأي القائلين بأن «أو» للتخيير نقاشاً علمياً ، فقال :

«إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير ، إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً ، كما في كفارة اليمين ، وكفارة جزاء الصيد . أما إذا كان مختلفاً فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه ، كما في قوله تعالى :

﴿قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً﴾<sup>(٣)</sup> .

إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين ، بل لبيان الحكم لكل في نفسه ، لاختلاف سبب الوجوب. وتأويله : إما أن تعذب من ظلم ، أو تتخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحاً .  
ألا ترى الى قوله تعالى :

﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْلُودُ فَلْيُصَلِّهِ اسْمًا كَرِيمًا﴾<sup>(٤)</sup> ، وأما مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءٌ حَسَنًا ﴿﴾ .

وقطع الطريق متنوع في نفسه وان كان متحداً من حديث الأصل ، فقد يكون بأخذ المال وحده ، وقد يكون بالقتل لا غير ، وقد يكون بالجمع بين الأمرين ، وقد يكون بالتخويف لا غير فكان سبب الوجوب مختلفاً فلا يحمل على التخيير ، بل على بيان الحكم لكل نوع . أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة الى ظاهر التخيير في مطلق المحارب . فإما أن يحمل على الترتيب ويضم في كل حكم مذکور نوع من أنواع قطع الطريق ، كأنه سبحانه وتعالى قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يقتلوا، أو يصلبوا، إن أخذوا المال وقتلوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ان أخذوا المال لا غير ،

(١) سورة الشورى ، الآية ٤٠ .

(٣) سورة الكهف ، الآية ٨٦ .

(٢) ج ٧ ص ٩ .

(٤) سورة الكهف ، آية ٨٧ .

Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Karya Abdurrahman al-Jaziri)

كتاب الطلاق / هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما؟ \_\_\_\_\_ ٤٩٣

## مبحث هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج

### أو الزوجة أو حالهما؟

في هذا المبحث تفصيل المذاهب<sup>(١)</sup>.

يحل له أن يأتيها بخادم بالغ شاب، بل ينبغي أن يكون الخادم صغيراً أو ممسوحاً أو امرأة، وإذا قال لها: أنا أخدمك بنفسي فإنها لا تلزم بقبوله، وللزوج تبديل الخادم بغيره بدون اعتراض ولو كانت خادمة ألفتها الزوجة، ويلزمه نفقة الخادم وكسوته بحسب ما يليق بالخادم.

وأما الكسوة فإنها تفرض لها بحسب حالها أيضاً، فإن كان مثلها يلبس حريراً فرض لها الحرير، وإلا فالقز والقطن حسب حالها، وتقدر حسبما اعتاده الناس، ويلاحظ فصل الشتاء فيزداد فيه ما يقبها البرد، ويتبع الكسوة فرش المنزل من حصر وبساط ولحاف ومخدة ومرتبة ونحو ذلك فإنه يلزمه ويفرض عليه، وينظر في كل ذلك لما جرت به عادة أمثالها، ولا يلزمه أن يأتيها بالثياب التي تتزين بها عادة، كبذلة العيد والفرج ونحو ذلك، وعليه ما تغطي به رأسها أو تلبسه في رجلها، أما الإزار التي تخرج به «الحبرة» أو «البالطو» فإنه لا يلزمه.

وأما المسكن فإنه يفرض لها حسب حالها، بحيث يكون مشتملاً على الأدوات المطلوبة من آنية وفرش على الوجه المتقدم.

(١) الحنفية - قالوا: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين فلا خلاف في أمرهما، فتقدر في حال اليسر بنفقة اليسار، وفي حالة العسر بنفقة الإيسار، أما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً، ففيه رأيان مصححان:

الرأي الأول: تقدر النفقة بحسب حالهما معاً، بمعنى أنها تجب لها نفقة الوسط، فإذا كان الزوج موسراً وهي فقيرة، وجبت لها نفقة الوسط بحيث تكون زائدة عن حالها ناقصة عن حاله، وهذا لا إشكال فيه، أما إذا كانت هي غنية وهو فقير، فقد يقال: إن النفقة الزائدة عن حاله يعجز عن أدائها، ويجاب: بأنه تجب عليه نفقة الوسط، ولكن لا يكلف إلا بدفع نفقة الفقير، والباقي يبقى ديناً في ذمته.

الرأي الثاني: اعتبار حال الزوج فقط، فإن كان غنياً وهي فقيرة، فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان فقيراً وهي غنية، فرضت عليه نفقة المعسرين وكلا القولين مصحح، ولا يخفى أن الثاني هو المنضبط في باب الأحكام، وحيث كان صحيحاً فينبغي الأخذ به، وإن كانت المتون على الأول.

المالكية - قالوا: ينظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معاً، سواء كانا غنيين، أو فقيرين، أو أحدهما غنياً والآخر فقيراً، فإذا تساوبا غنى وفقراً فالأمر ظاهر، وإن اختلفا بأن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً فاللازم حالة وسطى بين الحالتين، فإذا كان فقيراً وهي غنية، قدر لها نفقة أكثر مما لو

٤٩٤ \_\_\_\_\_ كتاب الطلاق / هل تقدر النفقة بالحبوب والقماش أو بقيمتها نقداً؟

## مبحث هل تقدر النفقة

### بالحبوب والقماش أو بقيمتها نقداً؟

في تقدير النفقة بالنقود، أو غيرها تفصيل المذاهب<sup>(١)</sup>.

كانت فقيرة تحت فقير، وهذا هو المعتمد، أما اعتبار حال الزوج وحدها فلم يقبل بها المالكية فالمالكية متفقون على الرأي الأول عند الحنفية.

الشافعية - قالوا: قد عرفت أن النفقة ثلاثة أنواع: إطعام، وكسوة، ومسكن، فأما الإطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج إيساراً ويساراً، فلا نظر فيهما لحال الزوجة، وقد عرفت حق الزوج الموسر والمعسر، وأما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي لا بحسب حاله هو، وذلك لأن الإطعام والكسوة يعتبر فيهما التملك، بمعنى أن الزوج يملكها إياهما، وهو لا يملك إلا ما يقدر عليه، أما المسكن فالمعتبر فيه المتعة، إذ الزوج لا يملك زوجته المسكن وهو ملزم بأن يمتعها حسب حالها.

الحنابلة - قالوا: أن المعترف حال الزوجين معاً، يسراً وعسراً، عند التنازع لا عند العقد، فإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً، فرضت نفقة الوسط، وإن كانا موسرين، فرض لها نفقة الموسرين، وهكذا.

وبهذا تعلم أن المالكية، والحنابلة والحنفية في أحد الرأيين متفقون على أن المعترف هو حال الزوجين، ولكن عرفت أن للحنفية رأياً آخر صحيحاً، وهو اعتبار حال الزوج، أما الشافعية فيوافقون على هذا الرأي إلا في المسكن.

(١) الحنفية - قالوا: ذلك موكول للقاضي، فإنه يجب عليه أن ينظر إلى حال الزوج أو إلى حالهما معاً، على التفصيل المتقدم، ثم ينظر إلى حال الزوجة، فإن كان من مصلحتها أن يفرض لها أصنافاً من حبوب وقماش وآنية ونحو ذلك فعل، وإن كان من مصلحتها النقود فرض لها نقوداً بعد ما ينظر إلى سعر البلد، وينظر إلى ما هما عليه من عادة وعرف، وينظر إلى الأصناف اللازمة لها، ولا يجب في تقدير النفقة نقود معينة، بحيث لا تقل عنها، فإن لكل زمان ما يناسبه من ذلك، ويفرض لها كل يوم، أو كل شهر، أو كل سنة، حسبما يرى المصلحة في الصرف، فإذا كان موظفاً ينقد راتباً شهرياً، فرض لها كل شهر، وإذا كان عاملاً ينقد كل أسبوع فرض لها أسبوعياً، وإذا كان زارعاً يأتيه المحصول سنوياً، فرض لها النفقة عليه سنوياً لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة، وهكذا بحسب الحال.

هذا، وإذا اشترط في عقد الزواج أن ينفق عليها تمويلاً، وأن يأتي لها في الشتاء بكسوة وفي الصيف بكسوة، فإن هذا الشرط لا يعمل به، ولها بعد ذلك أن تطلب تقدير النفقة لتتقرر وتصير ديناً في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك.

المالكية - قالوا: تفرض النفقة أصنافاً من إطعام وكسوة ولوازمها، على الوجه الذي تقدم بيانه، وللزوج أن يعطيها الثمن المناسب لسعر البلد إذا رضيت بذلك، وإلا فلها الحق في الأصناف وتفرض

## مبحث نفقة الأولاد

في نفقة الأولاد على والدهم، صغاراً كانوا أو كباراً، عاطلين ذكوراً، أو إناثاً، تفصيل المذاهب<sup>(١)</sup>.

هذا، ولا يرفع إعساره أن يكون مالكاً لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة قريية. كما لو ملك فدائاً ولم يسلمه لها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم. فإن هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمة طويلة، بل ربما عجزت عن نزع ملكيته ومثل ذلك ما إذا كان له غلة لا يتيسر لها الحجز عليها أو يتمكن هو من استردادها بالطرق المعروفة في المحاكم الأهلية، فإنه في كل هذه يعتبر معسراً، فلها الحق في فسخ الزواج بالطريقة المذكورة، وهذا الكلام حسن في زماننا، ويجب العمل به مع الأزواج المماطلين في الإنفاق على زوجاتهم.

الحنابلة - قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة، وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها من إطعام أو كسوة أو سكنى، خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام ونحوها. وبين المقام معه على النكاح ولا يلزمها أن تختار حالاً، بل تختار كما تشاء، فتخيرها على التراخي لا على الفور، وإذا اختارت أن تبقى معه، فلها أن تمكنه من نفسها، وتكون نفقة المعسر ديناً في ذمته، ولكن لا يجب عليها أن تمكنه من نفسها، كما لا يجب عليها أن تحبس له نفسها، فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت موسرة، وإذا اختارت المقام معه، ثم بدا لها أن تختار الفسخ فإن لها ذلك، وإذا كان الزوج صانعاً أو تاجراً، وتعذر عليه الكسب أياماً يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته. ومثل ذلك ما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه في أيام يسيرة. أما إذا طال مرضه فلها حق الفسخ، ولا يشترط عدم علمها بفقره، فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم عجز عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ، حتى ولو رضيت أو اشترط في العقد عدم الإنفاق عليها، فإن ذلك لا يعتبر ولها حق خيار الفسخ وإذا كان غائباً وله مال حاضر أعطيت منه نفقتها، فإن كان عقاراً يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه نفقة يوم بيوم، فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه، فلها فسخ النكاح، فإذا ظهر له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد.

هذا، وإذا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من الآن، فلا حق لها في الفسخ، وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم، وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن العقد لا يفسخ، ويبقى ثمن الأدم ديناً في ذمته، وإذا كان له دين متمكن من استيفائه، فإنه يكون به موسراً ولا فسخ أما إذا لم يكن متمكناً من استيفائه فإنه يكون معسراً، وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة، فإنه يصح إن كانت موسرة، وإلا فلا.

(١) الحنفية - قالوا: لا يخلو إما أن يكون الولد ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً، فإن نفقته تجب على أبيه بثلاثة شروط، الشرط الأول: أن يكون فقيراً لا مال له، الشرط الثاني: أن لا يبلغ الحلم، فإن بلغ ولم يكن به عاهة تمنعه من التكسب كان عليه أن يتكسب وينفق على نفسه، وإلا

استمرت نفقته على أبيه، ومع هذا فللاب أن يؤجر ابنه الذي لم يبلغ في عمل أو حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه ما دام يمكنه ذلك، إلا إذا كان طالب علم مستقيم، فإن نفقته تجب على أبيه، ولو كبيراً، وليس له منعه من طلب العلم. الشرط الثالث: أن يكون الولد حراً، فإن كان له ولد مملوك للغير، فإن نفقته لا تجب عليه، بل تجب على المالك.

أما إذا كان الولد أنثى، فإن نفقتها تجب على والدها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بشرطين: الشرط الأول: أن تكون فقيرة، لو كان لها مال وجب أن ينفق عليها من مالها، وليس للاب أن يؤجر بنته الفقيرة في عمل لتكتسب بخلاف ما إذا كانت ذكراً. كما عرفت، على أن له أن يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة الخياطة أو التطريز أو النسيج أو نحو ذلك، فإذا تعلمت وكان لها من ذلك كسب فإن نفقتها تكون في كسبها، فالذي يمنع منه الأب تأجير ابنته للخدمة. لأن المستأجر ينفرد بها وذلك لا يجوز شرعاً.

الشرط الثاني: أن تكون حرة، فلو كانت مملوكة كانت نفقتها على مالكةها، وتقدر لهم نفقة الكفاية، بحيث يرى القاضي ما يكفيهم ويقدره لهم، فإذا اصطالحوا على نفقة معينة فإن كانت زائدة عن كفايتهم، فللاب أن يطلب انقاص الزائد، وإذا نقصت عن الكفاية فلهم طلب الكفاية، وعلى كل حال فيصح أن يصطلحوا على ما يدخل تحت التقدير، بأن يقدر بعضهم كفايتهم بعشرة، وبعضهم يقدرها بتسعة فيصطلحوا على تسعة، أما إذا اصطالحوا على خمسة عشرة فلم يدخل تحت التقدير، فللاب انقاصه، وكذا إذا اصطالحوا على سبعة، فلهما طلب الزيادة، والصبي الغني، هو الذي له مال حاضر، سواء كان عقاراً أو نقوداً أو ثياباً، فإن للاب أن يبيع ذلك وينفق عليه منه القدر اللازم لسكناه وحاجته الضرورية، فإن كان للصبي مال بعيد عنه لا يمكنه الحصول عليه حالاً كانت النفقة على أبيه إلى أن يحضر ماله. فإذا كان للصبي استحقاق في وقف لا يأتيه إلا في نهاية العام وجب على أبيه أن ينفق عليه، لأن هذا بمنزلة المال البعيد عنه، ولا يرجع الأب على الصغير بما أنفقه إلا إذا أشهد على أنه ينفق عليه ديناً، ويرجع عليه بعد حضور ماله، أو أذنه القاضي بالإنفاق، فإن لم يشهد ولم يأذنه القاضي، ولكن أنفق عليه بنية الرجوع، فإنه لا يصدق قضاء، وله الرجوع ديانة، فإذا كان الأب موسراً وامتنع عن النفقة على أولاده حبس في نفقتهم، ولا يحبس الوالد في دين ولده إلا دين النفقة، وإن كان معسراً فإنه يكلف بالتكسب والإنفاق، فإن عجز عن التكسب والإنفاق، وجب الإنفاق على أقارب الأولاد، وأقربهم إليهم أهمهم، فإن كانت موسرة أمرت بالإنفاق عليهم، على أن يكون ما تنفقه ديناً على الأب، إذا أيسر لها حق الرجوع عليه بما أنفقته، فإن لم تكن لهم أم موسرة وكان لهم جد موسر فإن نفقتهم تجب على جدهم، ثم إن كان أبوهم زمناً - به عاهة تمنعه من التكسب - سقطت عنه النفقة نهائياً فلا يرجع عليه والده بشيء، لأن نفقة الكبير الزمن على أبيه، وكذلك أولاده نفقتهم على جدهم، ولا يرجع بها كما لو كان أبوهم ميتاً، أما إذا لم يكن زمناً، فإن النفقة تكون ديناً عليه، فإن لم يكن لهم جد موسر، وكان لهم عم أو أخ موسر وجبت النفقة على واحد منهما، فللام أن تطالب أحدهما بالإنفاق.

بدون تقديم لأحدهما على الآخر. فإذا طالبت أحدهما فرض عليه الإنفاق، ويحبس إن امتنع، وإلا وجب الإنفاق على الأقرب فالأقرب، وعلى كل حال، فالصحيح أن المنفق يرجع بما أنفقه على الأب إذا أيسر إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المنفق الجد، وكان الأب زمناً، فإنه في هذه الحالة يكون كالميت فتسقط عنه النفقة، فإن لم يكن له قريب موسر وكان يستطيع التكفف، فإنه يؤمر بالتكفف لإطعام أولاده الصغار، فإن لم يستطع وجبت نفقتهم في بيت المال، كي لا يضيعوا.

المالكية - قالوا: يجب على الأب نفقة أولاده بشروط:

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، فلو كان للولد مال، أو صنعة رائجة يمكنه أن يتكسب منها فلا نفقة له على أبيه، وكذا إذا كان له مال ونفذ قبل بلوغه فإنه يكون له الحق في النفقة على أبيه ثانيها: أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على الكسب، فإذا بلغ على هذه الحالة فإن نفقته تسقط عن أبيه ولا تعود ثانياً إن طرأ عليه جنون أو عجز عن الكسب، أما إذا بلغ مجنوناً أو ذا عاهة تمنعه من الكسب فإن نفقته تستمر على أبيه. ثالثها: أن لا يكون الولد مملوكاً لغير أبيه، فإن كان مملوكاً وجبت نفقته على سيده. رابعها: أن يكون الأب موسراً فإن كان معسراً فإن نفقة الولد تسقط عنه، ولا يجبر الأب المعسر أن يكسب بصنعة أو غيرها لينفق على ولده المعسر ولو كان لذلك الأب صنعة، كما لا يجبر الولد على ذلك للإنفاق على أبيه، كما يأتي.

وإذا كانت أنثى حرة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخل بها زوجها، أو يدعى للدخول بها وهي مطيقة، فإن النفقة في هذه الحالة تجب على الزوج، كما تقدم، فإذا كانت زمنة فقيرة واستمرت بها الزمانة، ثم طلقها زوجها أو مات عنها عادت نفقتها على أبيها، ومثل ذلك ما إذا عادت إلى أبيها صغيرة أو بكرأ، أما إذا عادت ثيباً بالغة صحيحة فإن نفقتها لا تعود على أبيها.

فتحصل أن النفقة لا تعود على أبيها إذا عادت له بالغة صحيحة، أما إذا عادت زمنة فإن نفقتها تلزمه مطلقاً، على التحقيق، سواء كانت بالغة أو لا، وسواء دخل بها الزوج زمنة أو صحيحة ثم زمنت عنده.

وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة، فلو أطعمهم أحد غير أبيهم زمناً، فليس لهم المطالبة بخلاف الزوجة فإن نفقتها لا تسقط بمضي المدة، كما تقدم، نعم إذا خاصم أحد عن الأولاد أمام قاض لا يرى سقوطها بمضي المدة، ففضى بالنفقة الماضية المتجمدة، فإنها تقرر ولا تسقط، ومثل ذلك ما إذا أنفق على الأولاد شخص غير متبرع، فإن له الحق في الرجوع على أبيهم الموسر بما أنفق، بخلاف ما إذا أنفق شخص غير متبرع على والدي شخص آخر، فإنه لا يرجع عليه إلا بقضاء الحاكم، وتقدر لهما النفقة فيما يفضل عن قوته وقوت زوجته بما فيه كفايتهم.

ولا تلزم الأم بالإنفاق على أولادها، ولو موسرة، وإنما تلزم بالرضاع بدون أجر، إلا إذا كانت عظيمة لا يرضع مثلها، فإنها لا تلزم إلا إذا أبى الطفل أن يقبل غير ثديها، فإنها في هذه الحالة تلزم بإرضاعه.

## تقدير النفقة الزوجية :

لدى تقدير النفقة الزوجية يجب على القاضي أن يراعى أمرين :

- ١ - حال الزوج يسراً أو عسراً وتوسطاً بينهما بصرف النظر عن كون الزوجة موسرة أو معسرة ، فإن كان الزوج موسراً فرض لها نفقة اليسار ، ولو كانت الزوجة فقيرة ، وإن كان معسراً فرض لها نفقة الإعسار ولو كانت الزوجة غنية ، وإن كان متوسط الحال فرض لها نفقة الوسط بين اليسار والإعسار . وهو الأمر الذي نصت عليه المادة ١٦ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ٢٩ حيث نصت على أن تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حالة الزوجة .
- ٢ - لما كانت النفقة تفرض لحاجيات الزوجة وكفايتها في المعيشة ، فإنه يجب أن يراعى عند تقدير نفقة الزوجة حال الأسعار في الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً .



## تقدير النفقة :

تقدر النفقة الأولاد الصغار على أبيهم حسب ما يراه القاضى مراعيًا حال الأب من حيث يساره وارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار ومراعاة الحاجة ، فتقدر له نفقة الطعام والكساء وبدل فرش وغطاء وأجرة مسكن وأجرة خادم أن كان بحاجة إلى من يخدمه بأن كان صغيراً أو كان مريضاً . ويزيد الصغير على ذلك إنه بحاجة إلى من تقوم بارضاعه والى من تقوم على حضانته فيجب له أجر رضاع وأجر حضانه ، إلا أنه فى مدة الرضاع لا يكون محتاجا إلى طعام فلا تقدر نفقه . وتقدر نفقة الطعام وأجر المسكن وأجر الخادم والرضاع والحضانه شهرياً ، أما بدل الكسوة فتقدر كل ستة أشهر لأن الانسان يلزمه كسوة للشتاء وكسوة للصيف ، أما بدل الفرش والغطاء فيقدر مرة كل عام لأن الإنسان لا يحتاج إلى ذلك إلا مرة واحدة كل عام .

## استمرار نفقة الأولاد :

بينت الفقرة الثانية من المادة ١٨ مكرر ثانياً المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن نفقة الأولاد تستمر على أبيهم ، ووضعت حداً أقصى لهذا الاستمرار ويختلف بالنسبة للذكر عن الأنثى .

فبالنسبة للابن تستمر نفقته على أبيه إلى أن يتم الخامسة عشر من عمره بشرط أن يكون قد بلغها قادراً على الكسب المناسب . أما إذا أتم هذه السن عاجزاً عن الكسب استمرت نفقته بسبب هذا العجز ، وضرب النص أمثلة لما يمنع الابن من الكسب وهى :

( أ ) العجز عن الكسب بسبب آفة بدنية أو عقلية .

(ب) طلب العلم بشرط أن يكون العلم الذى يطلبه الابن متفقاً واستعداده وملائماً لأمثاله .

(ج) عدم تيسر الكسب للابن ، بأن يكون قد جد فى طلب الحصول على عمل يتكسب منه فلم يهتد إلى ذلك سبيلاً أو جد أبوه فى ذلك ولم يوفق .

وبالنسبة للبنت : تستمر نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج أو تكسب ما يكفى نفقتها . ولم يشترط بالنسبة للبنت القدرة على الكسب إنما اشترط أن تكسب فعلاً ما يكفى لنفقتها .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan Setiaji
2. NIM : 1717302023
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 9 September 1999
4. Alamat Rumah : Kp. Pulo Jahe Rt.01/ Rw.10 Jatinegara, Cakung,  
Jakarta Timur
5. Nama Ayah : Muhammad Idris
6. Nama Ibu : Sri Sudaryati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 02 Jatinegara, 2011
  - b. SMP/Mts, tahun lulus : SMPN 194 Jakarta, 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 9 Jakarta , 2017
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pesantren, tahun masuk : Pondok Pesantren Roudlotul Uluum Karangsalam  
Kidul, Kedungbanteng, Banyumas, 2017

### C. Prestasi Akademik

1. Juara 2 Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) tingkat Kabupaten

### D. Karya Ilmiah

1. -

### E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN  
Purwokerto 2018-2019

Purwokerto, 12 Januari 2022  
Ttd.



Muhammad Ikhsan Setiaji